

**PENERAPAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU
(Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Inpres Bumi Bahari dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd.) Pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
(MPI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN)Palu*

Oleh

WARDAYANA
NIM: 14.1.03.0059

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (Studi Kasus Pada SD Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 03 September 2018 M
22 Dzulhijjah 1439 H

Penulis



Wardayana

Nim: 14.1.03.0059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu (Studi Kasus Pada SD Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu)”** oleh Wardayana, NIM. 14.1.03.0059 Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji.

Palu, 5 September 2018 M
14 Dzulhijjah 1439 H

Pembimbing I



Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag.
NIP.19770811 200312 2 001

Pembimbing II



Hamka, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730308 2001121 1 003

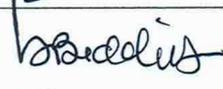
PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari **WARDAYANA** NIM:14.1.03.0059 dengan judul “**PENERAPAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU(STUDI KASUS PADA SD NEGERI INPRES BUMI BAHARI DAN SMP NEGERI 3 PALU)**”, yang telah diujikan dihadapan dewan Penguji Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 14 september 2018 M. yang bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah, dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Manajemen Pendidikan dengan beberapa perbaikan.

Palu, 27 Desember 2018 M

18 Rabi’ul akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr .Hj. Nur Asmawati, S.Ag, M.Hum.	
Penguji I	Dr. Azma , M.Pd.	
Penguji II	Arifuddin M. Arif, S.Ag, M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Hamka, S.Ag., M.Ag.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.
Nip. 19720126 200903 1 001

Ketua Jurusan
Manajemen Pendidikan Islam



A. Makarma, S.Ag., M.Th.I.
Nip. 19711203 200501 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Studi Tentang Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu” dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, beserta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Kamarudin dan Ibunda Manisah yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Tarbiyah Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur Dosen dan Pegawai IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, Bapak A. Markarma, S.Ag., M.Th.I, dan Ibu Wiwin Mistiani, S.Pd.I., M.Pd yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Ibu Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag., Pembimbing I dan Bapak Hamka, S.Ag., M.Ag, Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M, selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
7. Kaka penulis : Mahamuzi, Musnul idwan, dan Munawir Haris, Rahmi, yang selalu mesuport dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Penulis MPI-1 dan MPI-2 Angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.

9. Teman-teman PPL Penulis di SMA Negeri 2 PALU yang selalu memberikan motivasi.
10. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan mencari kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Palu, 5 September 2018 M
14 Dzulhijjah 1439 H

Penulis

Wardayana
Nim: 14.1.03.0059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-Garis Besar isi Skripsi.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Desentralisasi	9
C. Penerapan Desentralisasi	1 8
D. Sistem Pendidikan Nasional	3 4

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tahun Ajaran 2018/2019	50
Tabel 2	Data Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tahun Ajaran 2018/2019.....	51
Tabel 3	Data Pendidik Di Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari.....	54
Table 4	Data Pesrta Didik Di Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari	54
Table 5	Data Sarana Dan Prasarana Di Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari ..	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Pedoman Observasi
- Lampiran 2** : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3** : Daftar Informan
- Lampiran 4** : Pengajuan Judul
- Lampiran 5** : Surat Sk Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6** : Undang Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7** : Daftar Hadir Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8** : Surat Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi
- Lampiran 9** : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10** : Kartu Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 11** : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12** : Data pendidik Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu
Tahun Ajaran 2018/2019
- Lampiran 13** : Dokumentasi
- Lampiran 14** : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : **WARDAYANA**
Nim : **14.1.03.0059**
Judul Skripsi : **PENERAPAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU (STUDI KASUS PADA SD INPRES BUMI BAHARI DAN SMP NEGERI 3 PALU)**

Skripsi ini membahas tentang penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu. Rumusan masalah skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, dengan batasan masalah: 1. Bagaimana penerapan desentralisasi sistem pendidikan di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu? 2. Apa problematika penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari serta upaya yang dilakukan?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang menggambarkan *fenomenologi* hasil penelitian apa adanya. Dengan memilih lokasi penelitian di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu. Data-data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut di analisis melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Penerapan desentralisasi sistem pendidikan di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu, sudah cukup baik, tetapi belum bisa dibilang optimal, adapun keputusan yang dapat di desentralisasikan yaitu: organisasi dan proses belajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan, dan sumber daya. 2. Kendala dalam penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional yaitu masalah kurikulum, dana/pembiayaan, SDM, sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dalam masalah kurikulum kepala sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari melakukan pelatihan, workshop tentang Kurikulum K13, masalah dana menyusun RKA (rencana kerja dan anggaran) sesuai kebutuhan, masalah SDM upaya yang dilakukan melakukan pelatihan untuk guru yang belum bisa mengoperasikan leptob, komputer, melakukan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) se kota Palu, upayanya menjaga sarana dan prasarana yang sudah baik, dan yang sudah rusak diganti. Dari penelitian di lapangan penerapan desentralisasi sistem pendidikan di SD Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu memiliki perbedaan dari segi pelaksanaan kurikulum.

Implikasi penelitian yang pertama di tunjukan kepada: 1. Kepada kepala sekolah baik itu Sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari dapat lebih memperhatikan semua hal yang berhubungan dengan sekolah, seperti guru, sarana dan prasarana, dan kurikulum. 2. Kepada guru atau tenaga pendidik agar lebih di tingkatkan lagi potensi yang dimiliki, lebih kreatif dan inovatif dalam hal memberikan pembelajaran ke siswa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impian adanya pendidikan bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Padahal sampai saat ini, tatanan kehidupan yang demokratis masih lebih banyak merupakan keinginan dari pada kenyataan.

Dalam alam yang tidak demokratis, tidak mungkin dapat mengelola pendidikan secara otonom, dan tanpa otonom tidak mungkin dapat mengelola pendidikan secara otonom, dan tanpa otonom tidak mungkin dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Orde reformasi sebuah masa pasca orde baru, sedikit demi sedikit telah memulai membuka “kran kebebasan” yang semakin lebar dan memberikan otonomi penyelenggaraan pendidikan yang semakin kuat.

Dalam konteks otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralis selama ini kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebab sistem pendidikan yang sentralis diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman

daerah, keberagaman sekolah,serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.¹

Menurut Mulyasa, desentralisasi mengandung arti pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelolah pendidikan yang ada di daerah pada tingkat pendidikan yang ada di daerah pada tingkat profinsi maupun lokal, sebagai perpanjang aparat pusat untuk meningkatkan efesiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di daerah.

Dengan kehadiran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (dimulai Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999) tentang pemerintah daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi, inovasi,dan improvisasi dalam upaya pembangunan daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan otonomi daerah tersebut membawa implikasi terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan, yang salah satunya adalah berkurangnya peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pendidikan.

Adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Ada empat jenis keputusan pendidikan yang dapat di desentralisasikan yaitu menyangkut organisasi dan proses pembelajaran, manajemen guru, perencanaan dan struktur, dan sumber daya.

Tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan yang berarti proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada

¹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006),1.

reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi bahkan rasa tanggung jawab orang tua dalam kegiatan pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Dengan adanya perubahan paradigma baru, yaitu berupa desentralisasi pendidikan, sekolah diharapkan mampu menjalankan kewenangan yang telah diberikan pemerintah daerah kepada sekolah. Maka diharapkan mampu menerapkan desentralisasi pendidikan secara benar. Penerapan desentralisasi di sekolah sudah cukup baik tetapi belum optimal, karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti masalah kurikulum, masalah dana/ pembiayaan, masalah SDM, dan masalah sarana dan prasarana, begitu halnya di sekolah tempat penulis meneliti yaitu di SMP Negeri 3 Palu dan SD Inpres Bumi Bahari, penerapan desentralisasi di sekolah tersebut sudah baik tapi belum optimal karena masih ada kendala-kendala seperti penulis sebutkan di atas. Dari hal tersebut penulis tertarik mengambil judul “Studi Tentang Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan di kaji dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di dinas pendidikan dan kebudayaan kota Palu?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi batasan permasalahan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Inpres Bumi Bahari?
- b. Apa problematika penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari serta upaya yang dilakukan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan penegasan dari sub rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis memfokuskan tujuan penelitian yang didasarkan pada sub rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Inpres Bumi Bahari
- b. Untuk mengetahui problematika penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Inpres Bumi Bahari serta upaya yang dilakukan

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Ilmiah, yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- b. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada instansi terkait, khususnya SMP Negeri 3 Palu dan SD Inpres Bumi Bahari sehingga dijadikan sebagai barometer untuk melakukan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam pengembangan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan paradigma berfikir untuk mengembangkan penelitian selanjutnya khususnya mengenai Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi makna yang berbeda dikalangan pembaca dalam menafsirkan berbagai istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dibawah ini akan ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Penerapan desentralisasi

Secara harfiah *de* berarti tidak dan *sentral* berarti terpusat. Desentralisasi dalam pemerintahan bermakna sifat pemerintah pusat yang lebih banyak memberikan otonomi kepada pemerintah daerah.²

2. Sistem pendidikan nasional

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang artinya sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.

Dalam Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bab 1 (ketentuan umum) pasal 1, poin 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.³

²Yus Badudu, M. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004),336.

³ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI. No 2 Tahun 1989) Dan Peraturan Pelaksanaannya*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1995),3.

Dengan demikian maksud dari “sistem pendidikan nasional ialah “suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan aktifitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional”⁴.

E. Garis-Garis Besar Isi

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya saling berhubungan, diawali dengan:

Bab I, berisikan tentang pendahuluan yang mengemukakan beberapa hal pokok dan menyetengahkan beberapa landasan dasar dalam pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab II berisikan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, pengertian desentralisasi, penerapan desentralisasi, dan sistem pendidikan nasional.

Bab III, berisikan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal, yaitu pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada yakni bagaimana penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di dinas pendidikan dan kebudayaan kota Palu.

⁴ Ibid,3.

Bab V, yang merupakan bab penutup dari isi skripsi ini, berisikan beberapa kesimpulan yang tentunya senantiasa mengacu pada rumusan masalah yang dikaji serta saran yang merupakan input dari penulis yang berkaitan dengan studi tentang penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini di uraikan penelitian terdahulu terkait dengan judul yang diangkat. Sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama penelitian Muhammad M Yasin “Implikasi sistem pendidikan nasional terhadap pendidikan Islam (studi atas sistem penyelenggaraan pendidikan Islam)”.¹ Pembahasannya yaitu lebih difokuskan pada pendidikan Islam, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam, pengaruh sistem pendidikan nasional pada pendidikan Islam, dan lain sebagainya.

Kedua penelitian Lely Anna Puspa Sari “Penerapan Asas Desentralisasi Asimetris dalam Penetapan Kawasan Khusus Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Daerah Di Indonesia”,² pembahasannya yaitu menganalisis penerapan dari desentralisasi asimetris itu sendiri dalam wujud kawasan khusus, penerapan desentralisasi asimetris dapat menjadi salah satu solusi pengembangan potensi daerah.

¹Muhammad M Yasin, “Implikasi Sistem Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam (Studi Atas Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam)”, *Skripsi*, Palu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2010.

²Lely Anna Puspa Sari, “Penerapan Asas Desentralisasi Asimetris Dalam Penetapan Kawasan Khusus Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Daerah Di Indonesia”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Ketiga oleh Tutik Dwi Karyanti berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran, Desentralisasi, dan Sistem Pengukuran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris di Politeknik Negeri Semarang)”,³ pembahasannya meliputi pengaruh sasaran yang jelas dan terukur, desentralisasi dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja Organisasi, dan hubungan desentralisasi dengan kinerja organisasi.

Penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian penulis karena membahas tentang penerapan desentralisasi namun perbedaannya fokus penelitian penulis adalah penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional, persamaannya terletak pada penerapan desentralisasi dan dari segi perbedaannya terletak pada jenjang dan fokus penelitian, tempat penelitian, serta obyek penelitian. Dengan demikian hasil-hasil penelitian dan disertasi dan tesis sebagaimana telah disebutkan di atas telah memberikan ilustrasi kepada penulis dalam meneliti tentang Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

B. Pengertian Desentralisasi

1. Pengertian desentralisasi pendidikan

Secara harfiah *de* berarti tidak dan *sentral* berarti terpusat. Desentralisasi dalam pemerintahan bermakna sifat pemerintah pusat yang lebih banyak memberikan otonomi kepada pemerintah daerah.⁴ Noah Meriam mendefinisikan

³Tutik Dwi Karyanti, “Pengaruh Kejelasan Sasaran, Desentralisasi, Dan Sistem Pengukuran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Di Politeknik Negeri Semarang)”, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

⁴Yus Badudu, M. Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), 336.

bahwa desentralisasi merupakan tata pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.⁵ Secara umum desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dari institusi pendidikan tingkat pusat kepada institusi pendidikan di tingkat daerah hingga pada tingkat sekolah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 butir (e) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang daerah otonom dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.⁶ Menurut Mulyasa Desentralisasi mengandung arti pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada di daerah pada tingkat provinsi maupun lokal, sebagai perpanjangan aparat pusat untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di daerah.⁷

Kemudian dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1(7) dijelaskan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menerima input pembelajaran sesuai dengan tuntunan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas.⁸

Jadi desentralisasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambil-alihan keputusan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah. Namun tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian

⁵Noah Meriam, *Dictionary Of The English Language*, Second edition, (William Collin Publishers, Co, 1980),470.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 1999), Pasal 1 Butir (E).

⁷E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2005) 22.

⁸Undang- undang R.I, Nomor 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*, pasal 1, ayat 7.

dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Mendorong terciptanya kemandirian. Percaya terhadap pemerintah daerah. Kemudian pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

2. Tujuan desentralisasi pendidikan

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi pendidikan dilatarbelakangi bahwa setiap daerah mengetahui sejarah, kondisi, potensi, permasalahan, dan aspirasi daerahnya sendiri. Untuk itu daerah yang bersangkutan harus mampu merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan serta menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan daerah bersangkutan.

Pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, Amerika Serikat, dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka tujuan strategi desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (*school resources*; dana pendidikan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat).⁹

Di samping itu secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu

1. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik)

⁹Armida S. Alisjahbana, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan, (Bandung, Universitas Padjajaran, 2000), hlm. 2.

2. Desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah.¹⁰

Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, sedangkan konsep kedua memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan yang berarti proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi bahkan rasa tanggung jawab orang tua dalam kegiatan pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

Di era otonomi daerah terakhir ini terjadi pergerakan global. Pergerakan tersebut menuju model desentralisasi pembangunan sebagai alat untuk kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Juga sebagai akuntabilitas, transparansi pemerintahan, efektivitas ekonomi dan kesamaan akses terhadap pelayanan. Usaha ini baru memperoleh titik terang dengan terbitnya dua undang-undang tentang pemerintahan dan otonomi daerah. Secara umum tujuan desentralisasi ialah:

- a. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan masalah-masalah otonomi di tingkat daerah.
- b. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan usaha sosial ekonomi pada tingkat daerah secara lebih realistis.

¹⁰ M. Sirozi, Politik Pendidikan, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2005), hlm. 83.

- c. Melatih rakyat untuk dapat lebih mengatur urusannya sendiri.
- d. Membina kesatuan nasional.¹¹

3. Ruang lingkup desentralisasi pendidikan

Menurut Jalal dan Musthafa dikutip dalam bukunya Sirozi,¹² ada dua konsep yang berbeda, tetapi saling terkait dalam desentralisasi pendidikan. Konsep pertama berkenaan dengan isu umum desentralisasi, yaitu transfer otoritas kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah. Dalam konsep ini, pemerintah harus mendelegasikan kebijakan-kebijakan pendidikan kepada pemerintah daerah beserta dana yang dibutuhkan untuk membiayai tanggung jawab yang dibebankan.

Pemerintah perlu menghitung kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah yang memutuskan berapa banyak dan belanja pendidikan apa yang diperlukan. Konsep kedua berkenaan dengan pergeseran berbagai keputusan pendidikan dari pemerintah ke masyarakat. Ide dasar dibalik konsep ini bahwa masyarakat harus lebih tahu dan memutuskan sendiri program pendidikan yang dikehendaki karena masyarakatlah yang akan memanfaatkan.

Dengan dua konsep tersebut maka jelaslah bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada semacam konsensus global, khususnya di kalangan negara berkembang, bahwa melakukan desentralisasi adalah cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

¹¹Fasli Jalal, (ed), *Pendidikan dalam konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicipta, 2001). 23.

¹²Ibid, 234.

Desentralisasi meningkatkan pembiayaan diberbagai bidang pembangunan. Dengan desentralisasi ini pemerintah daerah dapat lebih mengeksplorasi sumber-sumber kekayaan daerah, termasuk melibatkan para stakeholder (*pihak-pihak yang berkepentingan*) dalam bidang pendidikan. Tujuan yang kongkrit adalah untuk berperan lebih aktif dalam membiayai pendidikan, peningkatan efesiensi dan efektifitas pendidikan. Untuk kelancaran hal tersebut manajemen terpadu, trampil dan berdaya guna. Tanpa ini semua, apa yang diharapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan manajemen baru yang sesuai dengan dinamika persoalan yang dihadapi. Manajemen menjadi faktor yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi otonomi daerah diIndonesia. Desentralisasi pendidikan dalam bentuk manajemen yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokratisasi.

Desentralisasi manajemen pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unit pusat terhadap persoalan-persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit ditataran bawah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peran unit dibawah, atau peran rakyat, atau peran rakyat atau masyarakat daerah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnya otonomi dalam pendidikan diberikan kepada daerah, tetap harus konsisten dengan sistem konstitusi. Sesuai tuntunan reformasi dalam pembangunan di Indonesia, tampaknya pelaksanaan desentralisasi manajemen pendidikan merupakan suatu keharusan, disamping memang sejumlah peraturan perundang-undangan yang

sudah ditetapkan menuntut untuk segera dilaksanakan. Juga untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia tampaknya bukanlah hal yang mudah, termasuk penyerahan seluruh urusan pendidikan kepada daerah kabupaten/ kota, bukanlah hal yang gampang, dibutuhkan waktu, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, karena menyangkut sejumlah masalah dan kendala perlu di atasi, termasuk kesiapan sumber pembiayaan, SDM, dan sumber-sumber lain.¹³

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan *sosial capital*, dan peningkatan daya saing bangsa.

1. Masyarakat Demokrasi

Masyarakat demokrasi atau di dalam khasanah bahasa kita dinamakan masyarakat madani (civil society) adalah suatu masyarakat yang antara lain mengakui akan hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang

¹³Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), 92.

bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakat sendiri. Sikap serta nilai yang telah diuraikan di atas yang merupakan ciri khas dari masyarakat demokrasi tidak datang dengan sendirinya tapi merupakan suatu proses. Proses tersebut adalah proses pendidikan atau dapat juga disebut sebagai proses pemanusiaan.

Perubahan dari pemerintahan yang sentralisasi kepada pemerintah yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah menuntut suatu persiapan. Lembaga-lembaga (*institute*) sosial yang ada harus dirombak dengan menggunakan paradigma baru. Perubahan paradikma kehidupan bermasyarakat tersebut memng tidak mudah dicapai. Selama bertahun-tahun paradigma lama yang berdasarkan kekuasaan telah membudaya dan oleh sebab itu perubahan ke arah masyarakat memerlukan pemimpin-pemimpin baru yaitu seseorang pemimpin demokrat, yang terbuka, bebas dari virus KKN. Dan sosok pemimpin demikian dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai.

2. Pengembangan “Social Capital”

Demokrasi sebagai *social capital* hanya dapat dikembangkan melalui proses pendidikan yang menghormati nilai-nilai demokrasi tersebut. Suatu proses belajar yang tidak menghargai akan kebebasan berfikir kritis tidak mungkin menghidupkan nilai-nilai demokrasi sebagai *social capital* suatu bangsa.

Sistem pendidikan yang sentralistis yang mematkan kemampuan berinovasi tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu msyarakat demokrasi yang terbuka. Oleh sebab itu desentralisasi pendidikan berarti lebih

mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai yang *empunya* pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi dalam pembentukan social capital tersebut , ikut sertanya rakyat didalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat demokratis berarti pula rakyat ikut membina lahirnya “social capita” dari suatu bangsa.

3. Pengembangan Daya Saing

Di dalam suatu masyarakat demokratis setiap anggotanya dituntut partisipasi yang optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi dan masyarakat. Daya saing didalam suatu masyarakat bukanlah kemampuan untuk saling membunuh dan saling menyingkirkan satu dengan yang lain tetapi didalam rangka kerja sama yang semakin lama semakin meningkat mutunya. Ada 4 faktor yang menentukan tingkat daya saing seseorang atau suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut ialah inteligensi, informasi, ide baru, dan inovasi.

a. Inteligensi

Inteligensi seseorang untuk hidup bersama bukan hanya semata-mata berupa kemampuan intelektual atau kemampuan dari jenis-jenis inteligensi yang ada pada manusia tetapi juga didalamnya apa yang disebut civic intelligence. Yang dimaksud dengan civic intelligence adalah kemampuan seseorang untuk hidup bersama didalam suatu masyarakat yang demokratis.

b. Informasi

Didalam dunia yang terbuka dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat maka masyarakat dunia ini tertinbun

dengan data-data informasi yang hampir tanpa batas. Informasi perlu dikuasai dan dimanfaatkan. Pemanfaatan informasi didalam kehidupan manusia memerlukan kemampuan analisis dan ketajaman inteligensi.

c. Ide Baru

Masyarakat global dewasa ini adalah masyarakat yang berkembang dengan pesat. Persaingan, penggunaan informasi yang tanpa batas memungkinkan lahirnya ide-ide baru. Ide-ide baru ini merupakan hasil dari persaingan manusia-manusia unggul yang haus akan perubahan. Informasi yang terkumpul dan melahirkan ide-ide baru perlu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

d. Inovasi

Kemampuan persaingan dengan pemanfaatan inteligensi serta informasi yang telah melahirkan ide-ide baru perlulah diterapkan di dalam kehidupan yang nyata. Inilah kemampuan inovasi suatu masyarakat atau ban yang gsa.Desentralisasi pendidikan akan melahirkan warga Negara yang inovatif, yang bisa bersaing tetapi juga yang dapat bekerja sama membangun suatu masyarakat yang demokratis.¹⁴

C. Penerapan Desentralisasi

1. Penerapan desentralisasi pendidikan

Pemberlakuan UU Otonomi Daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan diserahkannya sejumlah

¹⁴H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 20.

kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di Indonesia, termasuk juga dalam aspek pendidikan.

Menurut Mulyasa¹⁵ implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pada unit-unit kerja di daerah, kepegawaian yang menyangkut perubahan dan Pemberdayaan sumber daya manusia yang menekankan pada profesionalisme, serta perubahan-perubahan anggaran pembangunan pendidikan.

Secara tehnik operasional, pembangunan pendidikan tingkat atas eksistensinya tergantung rekomendasi kebutuhan pada tingkat bawahnya secara berjenjang, dalam arti substansi, proses, dan konteks penyelenggaraan pendidikan pada tingkat kabupaten /kota tidak mutlak sama, baik dengan daerah lain yang sederajat maupun dengan daerah provinsi. Secara teoritis, keragaman itu akan memunculkan sinergisme yang didukung oleh keunggulan komparatif dan kompetitif masing- masing daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.¹⁶

Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan akan tergantung kepada sistem politik dalam memberikan keleluasan tersebut. akan tetapi sekalipun keleluasan itu diberikan

¹⁵Mulayas, E., *Manajemen Berbasis Kompetensi; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 23.

¹⁶Yoyon Bahtiar Irianto, 80.

tidak dapat di artikan sebagai pemberian kebebasan mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara administrator pendidikan ditingkat kelembagaan suatu pendidikan. Sesungguhnya konflik kepentingan tersebut tidak perlu terjadi apabila para administrator tersebut memahami hakikat dan urgensi perlunya desentralisasi dalam pembangunan, yang walaupun terjadi tarik menarik kepentingan tersebut harus berdasarkan pada prinsip saling ketergantungan untuk menghasilkan sinergitas bagi tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang lebih luas.

Secara teoritis struktur organisasi desentralisasi ditentukan dengan tingkat pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur desentralisasi , sebagian keputusan di ambil pada tingkat hierarki organisasi tertinggi dan apabila sebagian besar otoritas didelegasikan pada tingkat yang rendah dalam organisasi , maka organisasi tersebut tergolong organisasi yang terdesentralisasi. Dengan demikian inti dari desentralisasi adalah pembagaaian kewewenang oleh tingkat organisasi di atas kepada organisasi dibawahnya. Implikasi dari hal tersebut adalah desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada pimpinan di tiap level organisasi dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi para administrator untuk berfikir dan bertindak dalam satu tim tanpa mengorbankan kebutuhan organisasi. Desentralisasi membutuhkan keseimbangan antara independensi para administrator serta komitmennya terhadap kelangsungan hidup organisasi.

Namun demikian, dalam prakteknya tidak seluruh kewenangan tersebut dapat didesentralisasikan. Kewenangan perumusan atau pembuatan kebijaksanaan nasional mengenai pendidikan yang meliputi kurikulum, persyaratan-persyaratan pokok tentang jenjang pendidikan, persyaratan pembukaan program baru, persyaratan tentang guru atau pendidik disetiap jenjang pendidikan, dan kegiatan-kegiatan strategis lainnya yang dipandang lebih efektif, efisien, dan tepat jika tidak didesentralisasikan masih dilakukan dan diperlukan sentralisasi. Sedangkan setiap kewenangan implementasi dan evaluasi kebijakan nasional dalam hal tertentu, dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat pula diserahkan atau didesentralisasikan keunit dibawah, didaerah atau kepada masyarakat. Demikian juga kewenangan pembuatan kebijakan yang berdimensi daerah tidak dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan bisa segera didesentralisasikan.

UU No. 32/2004 dan kitab UU No. 33/2004 menjadi dasar implementasi pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi kabupaten dan kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut kebutuhan, kemampuan dan tingkat perkembangan sendiri.

Pembaharuan sistem pemerintahan tersebut mempunyai implikasi langsung terhadap pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan masalah substansi, proses dan konteks manajemen penyelenggaraan pembangunan pendidikan. Namun, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk masa-masa mendatang, walaupun telah memiliki perangkat pendukung perundang-undangan, juga masih dihadapkan pada sejumlah faktor yang menjadi tantangan

dalam penerapan desentralisasi di daerah. Seperti tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya di daerah, tipe dan kualitas kematangan SDM yang diperlukan oleh daerah setempat, perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan dunia industri dan tingkat perkembangan lembaga-lembaga satuan pendidikan di setiap daerah. Ini semua mengisyaratkan perlunya pemikiran dan kajian yang lebih matang dalam menyiapkan situasi lokal atau lembaga satuan pendidikan, agar desentralisasi dalam manajemen penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁷

Sektor pendidikan yang didesentralisasikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah sebagai berikut : (1) kebijakan, (2) pembiayaan, (3) kurikulum, (4) sarana dan prasarana, (5) pendidik dan tenaga kependidikan, dan (6) pengendalian mutu pendidikan.

Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam Bab II pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana prasarana serta kepegawaian. Jumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan stakeholders di dalamnya. Jika pada masa sebelum diberlakukannya otonomi daerah, stakeholders pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, maka di era otonomi

¹⁷Ibid,80-82.

pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholders akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan arah otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digariskan pemerintah.¹⁸

Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam mengatur penerapan pendidikan nasional melalui standar-standar¹⁹ yang disepakati bersama standar-standar itu antara lain berupa “penyusunan kurikulum nasional, sistem akreditasi dan evaluasi nasional, sistem pemerintahan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah”. standar-standar demikian perlu dimiliki dan menjadi acuan, oleh karena bangsa Indonesia akan hidup ditengah-tengah pergaulan internasional. Bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi agar supaya tidak ketinggalan di dalam kehidupan global yang terbuka.

Untuk mempersiapkan perencanaan sesuai karakteristik daerah perlu dirumuskan sebagai berikut:

¹⁸Hasbullah, 18.

¹⁹Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000, PASAL 2, ayat 3, *Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*.

1. Perencanaan daerah mempunyai wewenang untuk memformulasikan tergetnya sendiri termasuk penentuan strategi untuk mencapai target tersebut dengan mengacu pada tujuan nasional.
2. Perencanaan daerah mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memobilisasi sumber-sumber lokal. Mempunyai kekuasaan untuk merombak sumber-sumber yang telah diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.
3. Perencanaan daerah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (*pemerintah pusat*), yaitu posisi unit yang lebih rendah bukan sebagai bawahan melainkan sebagai mitra dari unit pusat.²⁰

Dengan demikian, secara garis besar dalam rangka menerapkan desentralisasi pendidikan baik di tingkat daerah, kota maupun sekolah paling tidak harus memiliki beberapa syarat, yaitu:

- a. Adanya delegasi authority dari pemerintah pusat kepada tingkat di bawahnya seperti daerah, kota atau sekolah dengan masih dalam kerangka kebijakan nasional.
- b. Adanya pemahaman yang mendalam dari praktisi pendidikan agar supaya tidak tumpang tindih dalam proses pelaksanaan sehingga akan tercipta kesatuan pemahaman untuk mempermudah pencapaian tujuan.
- c. Adanya partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan pendidikan (community based education)

²⁰Ricard. M Bird,123.

- d. Penguasaan kemampuan dasar oleh praktisi pendidikan terutama ditingkat sekolah, kemampuan dasar tersebut yaitu: kemampuan manajerial, kemampuan *sunse of business*, kemampuan *sense of educated*.

Dalam penerapan desentralisasi pendidikan juga dibutuhkan adanya kolaborasi antara keiga pelaku utama pendidikan, yaitu pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat. Ketika pelaku utama pendidikan tersebut berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dengan manajemen yang lebih.

2. Kendala penerapan desentralisasi pendidikan

Untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia tampaknya mengalami banyak kesulitan, karena sejumlah masalah dan kendala yang perlu diatasi. Menurut Hasbullah²¹ masalah-masalah yang berkaitan dengan substansi manajemen pendidikan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah kurikulum

Sebagaimana diketahui bahwa kondisi masyarakat Indonesia sangat heterogen dengan berbagai macam keragaman, seperti budaya, adat, suku, sumber daya alam, dan bahkan sumber daya manusianya. Masing-masing daerah mempunyai kesiapan dan kemampuan yang berbeda dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan selama ini diarahkan pada kurangnya kepercayaan pemerintah pada daerah untuk menata

²¹Hasbullah, 20.

sistem pendidikannya yang sesuai dengan kondisi objektif di daerahnya. Situasi ini memacu terciptanya pengangguran lulusan akibat tidak relevannya kurikulum dengan kondisi daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kurikulum suatu lembaga pendidikan tidak sekedar daftar mata pelajaran yang dituntut di dalam suatu jenis jenjang pendidikan. Dalam pengertiannya yang luas, kurikulum berisi kondisi yang telah melahirkan suatu rencana atau program pelajaran tertentu, juga berkenaan dengan proses yang terjadi di dalam lembaga (proses pembelajaran), fasilitas yang tersedia yang menunjang terjadinya proses dan akhirnya produk atau hasil dari proses tersebut.

Kurikulum adalah keseluruhan program, fasilitas dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi dan misi lembaganya. Oleh karena itu, pelaksanaan kurikulum untuk menunjang keberhasilan sebuah lembaga pendidikan harus ditunjang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tenaga pengajar (guru) yang kompeten
- 2) Tersedianya fasilitas fisik atau fasilitas belajar yang memadai dan menyenangkan
- 3) Tersedianay fasilitas bantu untuk proses belajar mengajar
- 4) Adanya tenaga penunjang pendidikan, seperti tenaga administrasi, pembimbing, pustakawan, laboran
- 5) Tersedianya dana yang memadai
- 6) Menejemen yang efektif dan efesien
- 7) Terpeliharanya budaya yang menunjang, seperti nilai-nilai religious, moral, kebangsaan dan lain-lain

8) Kepemimpinan pendidikan yang visioner, transparan dan akuntabel

Kurikulum sekolah yang amat terstruktur dan sarat beban menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi steril terhadap keadaan dan perubahan lingkungan fisik dan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, proses pendidikan menjadi rutin, tidak menarik dan kurang mampu memupuk kreatifitas murid untuk belajar serta guru dan pengelola pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Kurikulum kelembagaan pendidikan yang baik adalah kurikulum kelembagaan pendidikan yang berkembang dari dan untuk masyarakat, yaitu kelembagaan pendidikan yang bersandarkan pada komunitas masyarakat. Namun demikian, pada zaman reformasi dan keterbukaan seperti sekarang, permasalahan yang timbul adalah bagaimana mengubah pola pikir yang dikembangkan secara sentralistik dan memasung kreatifitas masyarakat, menjadi pola pikir kemitraan. Dampak langsung dari sekian lama sistem sentralistik yang dijalankan adalah terpolanya cara berfikir masyarakat kebanyakan, baik birokrasi, para pendidik, maupun masyarakat umumnya. Mereka terbiasa berpikir dan bekerja dengan adanya juklak, juknis serta aturan sehingga sulit lahirnya kreativitas, improvisasi, inovasi. Kemitraan yang dimaksud adalah kemitraan antara masyarakat dan kelembagaan-kelembagaan pendidikan.

Dalam kaitan dengan manajemen kurikulum, peningkatan relevansi dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain perlu dilakukan manajemen kurikulum yang berangkat dari suatu prediksi yang dapat memberikan gambaran dan keadaan masyarakat beberapa tahun mendatang. Hal ini penting,

apalagi sekarang masyarakat cenderung lebih berpikir pragmatis, yakni suatu tuntutan kepada lembaga pendidikan untuk dapat melahirkan out-put yang mampu menjamin masa depannya terutama dalam sektor dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus tetap dijaga agar selalu responsif dalam mengikuti perkembangan teknologi yang menunjang pelaksanaan tugas lapangan di lapangan.

b. Masalah sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar yang paling utama dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan. Implementasi desentralisasi pendidikan masih menyimpan beberapa kendala seperti dalam pengangkatan pengelola pendidikan yang tidak memerhatikan latar belakang dan profesionalisme, Kepala Dinas pendidikan diangkat dari mantan camat, Kepala Dinas Pasar, dan bahkan Kepala Dinas Pemakaman yang terkadang sama sekali tidak mengerti masalah pendidikan. Meskipun para mantan pejabat itu pernah mengurus orang banyak, mereka mempunyai karakteristik yang berbeda dengan peserta didik dan manusia dan manusia yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, pengelolaan sumber daya manusia di daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota memang cukup memprihatinkan. Pimpinan daerah (gubernur, bupati, dan walikota) yang kekuasaannya sangat besar kadang-kadang menempatkan orang-orangnya secara serampangan dan jarang memerhatikan aspek profesionalisme. Koordinasi lembaga juga agak terhambat karena tidak ada hubungan secara hierarkis antara lembaga yang ada di tingkat kabupaten/kota dengan provinsi. Tidak jarang

ketika Dinas Pendidikan Provinsi harus melakukan koordinasi dengan Dinas pendidikan kabupaten/kota, tetapi pada waktu bersamaan di kabupaten dan kota juga dilaksanakan rapat dinas dengan bupati/walikota, maka Kepala Dinas Pendidikan biasanya lebih memilih mengikuti rapat dengan bupati/walikota yang merupakan atasannya, ketimbang mengikuti rapat atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Akibatnya hanya urusan yang mewakili Kepala Dinas Kabupaten/kota yang bisa hadir, dan dalam hal ini terkadang informasi yang diperoleh juga tidak pas dengan apa yang diharapkan. Fenomena ini sudah lumrah terjadi sejak dilaksanakan otonomi daerah.

Bagaimanapun sumber daya manusia yang kurang profesional akan menghambat pelaksanaan sistem pendidikan. Penataan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya menyebabkan pelaksanaan pendidikan tidak profesional. Banyak tenaga kependidikan yang latar belakang pendidikannya tidak relevan ditempatkan di dunia kerja yang ditekuninya.

Dalam bidang kepegawaian tampak bahwa rotasi atau mutasi pegawai atau guru antar kabupaten/kota dan provinsi sulit dilaksanakan karena alasan terbatasnya Dana Alokasi Umum (DAU), karena sektor penggajian guru biasanya masuk dalam alokasi dana DAU, sehingga pengurangan tenaga pegawai PNS guru yang disebabkan pindah ke kabupaten/kota atau provinsi yang lain, akan dianggap cukup memberatkan bagi daerah yang bersangkutan, terlebih-lebih bagi daerah yang minus sumber daya alamnya. Tidak jarang proses kepindahan guru harus melalui proses panjang dan berbelit-belit. Dari minta persetujuan Kepala Sekolah,

Kepala Cabang Dinas, Kepala Dinas, sampai asisten bidang administrasi, sekretaris daerah, dan Bupati/Walikota.

Untuk pegawai pusat biasanya meskipun Surat Keputusan pindah dari Mendiknas sudah terbit tetapi tidak dapat dilaksanakan secara langsung. Pengelolaan dan pembinaan pegawai negeri di kabupaten/kota satu dengan lainnya tidak sama, sehingga sering menimbulkan kecemburuan antar pegawai kabupaten/kota atau provinsi. Kekurangan tenaga guru sulit diatasi karena mutasi PNS/guru kabupaten/kota maupun provinsi tidak dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti ini akibatnya sangat merugikan daerah untuk dapat maju dan berkembang sesuai dengan potensi sumberdaya manusia yang dimiliki.

c. Masalah Dana, sarana dan prasarana pendidikan

Persoalan dana merupakan persoalan yang paling krusial dalam perbaikan dan pembangunan sistem pendidikan di Indonesia, dan dana juga merupakan salah satu syarat atau unsur yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Selama ini dikeluhkan bahwa mutu pendidikan nasional rendah karena dana yang tidak mencukupi, anggaran untuk pendidikan masih terlalu rendah. Padahal kalau mau belajar dari bangsa-bangsa yang maju bagaimana mereka membangun, justru mereka berani secara nekad menempatkan anggaran untuk pembiayaan pendidikan melebihi keperluan-keperluan yang lain.

UU nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebenarnya sudah mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat 1 dikemukakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan

kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana masyarakat yang selama ini digunakan untuk membiayai pendidikan belum optimal teralokasikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan daerah. Terserapnya dana masyarakat ke pusat membuat daerah menjadi semakin tidak berdaya membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan sangat tergantung pengadaannya dari pemerintah. Sementara itu, dalam konteks pembiayaan, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka anggaran pendidikan dialokasikan pada APBD. Terlihat jelas penurunan biaya penyelenggaraan pendidikan. Hal ini di samping pemahaman pimpinan daerah tentang pendidikan, banyak yang masih sangat terbatas, tidak jarang mereka juga menempatkan pembangunan pendidikan bukan berada pada skala prioritas. Umumnya di daerah, termasuk Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), DPRD dan pengambil kebijakan yang lain, bila berbicara tentang pendidikan semua sepakat merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus menjadi prioritas pembanguana.

d. Masalah organisasi kelembagaan

Dalam hal kelembagaan kependidikan antar kabupaten/kota dan propinsi tidak sama dan terkesan berjalan sendiri-sendiri, baik menyangkut struktur, nama organisasi kelembagaan, dan sebagainya. Menurut undang-undang memang ada kewenangan lintas kabupaten/kota, tetapi kenyataannya itu hanyalah dalam tataran konsep, praktiknya tidak berjalan.

Di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 4 ayat 2 dikemukakan bahwa masing-masing daerah propinsi, kabupaten/kota berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki termasuk di dalam pendidikan.

Sementara itu, pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan lagi pada pasal 2 ayat 1 Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Dan ayat 2 pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan satu sistem, keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.²²

Sebagai gejala umum, jenjangan jenis kelembagaan pendidikan dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga tampak satu sama lain tidak mempunyai hubungan. Kelembagaan pendidikan tinggi misalnya, seolah-olah tidak berkaitan dengan kelembagaan pendidikan menengah. Demikian juga dengan kelembagaan pendidikan menengah tidak tampak ada hubungannya dengan kelembagaan pendidikan dasar. Pemilahan jenis dan jenjang kelembagaan pendidikan ini tampaknya merupakan hasil dari sistem birokrasi dan sentralisasi pengelolaan kelembagaan pendidikan. Dengan demikian, kelembagaan pendidikan tampaknya

²²Hasbullah, 27-28.

terpisah dan eksklusif dari masyarakatnya, serta tidak mengabdikan pada kebutuhan masyarakat dan daerah.

e. Masalah perundang-undangan

Bagaimanapun sistem sentralisasi, dekonsentrasi dan desentralisasi dalam pemerintahan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, terutama yang berkaitan dengan masalah kebijakan, manajemen, mutu, kontrol dan sumber-sumber dana pendidikan. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk masa kini, selain telah memiliki perangkat pendukung perundang-undangan nasional, juga dihadapkan kepada sejumlah faktor yang menjadi penerapan desentralisasi pendidikan di daerah, seperti tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya di daerah, tipe dan kualitas kematangan SDM yang diperlukan oleh daerah setempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dunia industri dan sebagainya.

Kenyataan tersebut mengisyaratkan perlunya pemikiran dan kajian yang lebih matang dalam menyiapkan situasi lokal dan sekolah agar desentralisasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dapat terlaksana sebagaimana yang menjadi keinginan bersama.

f. Masalah pembinaan dan koordinasi

UU Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan-pembinaan agar permasalahan yang muncul dapat diminimalisasi.

Di samping pembinaan, koordinasi juga sangat diperlukan bagi daerah, hal ini terutama untuk menghindari seperti terjadinya tumpang tindih program, antara daerah dan sebagainya.

Meskipun desentralisasi sudah ada dalam peraturan dan regulasi otonomi daerah, tetapi dalam kelembagaan dan sikap akademik guru, kepala sekolah dan jajaran Dinas Pendidikan sebagai atasannya belum sinkron. Pemerintah daerah belum menunjukkan penampilan dan cara kerja yang jelas, dan yang mereka lakukan masih pada pemanfaatan dana, bukan pada akademik activity.

D. Sistem Pendidikan Nasional

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang artinya sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian yaitu :

- a. Dipakai untuk menunjukkan adanya satu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu.
- b. Sistem dapat menunjukkan adanya alat-alat atau organ tubuh keseluruhan yang secara khusus memberikan andil terhadap berfungsinya fungsi tubuh tertentu yang rumit namun amat vital.
- c. Sistem dapat dipakai untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis.

- d. Sistem dapat digunakan untuk menunjuk suatu hipotesis atau uraian suatu teori.²³

Pendidikan nasional, yang mana terdapat suatu usaha dalam mencerdaskan anak bangsa melalui bimbingan agar dapat menjadikan dan membentuk kepribadian yang berdasarkan ketuhanan, berkesadaran bermasyarakat, berjiwa patriot, dan berjiwa pancasila sesuai dengan tuntunan UUD tahun 1945 sehingga terwujudnya visi dan misi bangsa Indonesia. Sistem merupakan suatu strategi dalam mewujudkan pendidikan nasional agar terkoordinasi dan terlaksana secara efektif dan efisien.

Sebagai suatu sistem, pendidikan nasional mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang di cantumkan pada undang-undang pendidikan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan nasional merupakan sebuah manifestasi dari tindakan berfikir secara objektif yang melibatkan para pakar pendidikan dalam merumuskan suatu sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sehingga mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Melalui proses pendidikan, suatu bangsa berusaha untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dalam bidang-

²³H Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Pt Aneka Cipta Jakarta. 1997) 107.

bidang kehidupan budaya lainnya. Melalui proses pendidikan pula, suatu bangsa berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang direncanakan. Pendidikan nasional juga merupakan pelaksanaan pendidikan suatu Negara berdasarkan sosiokultural, psikologis, ekonomis, dan politis. Pendidikan tersebut di tujukan untuk membentuk ciri khusus atau watak bangsa yang bersangkutan, yang juga sering disebut dengan “kepribadian nasional”.²⁴

Dalam Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bab 1 (ketentuan umum) pasal 1, poin 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.²⁵

Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: “*Tiap- tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*”, kemudian didalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 5 disebutkan ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan ayat (5) setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”.²⁶

²⁴Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Edisi Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),121.

²⁵Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI. No 2 Tahun 1989) Dan Peraturan Pelaksanaannya*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1995),3.

²⁶Hasbullah,125.

Dengan demikian maksud dari “sistem pendidikan nasional ialah “suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan aktifitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional”²⁷.

²⁷Hasbullah,3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan merupakan asumsi yang mendasari dalam menggunakan pola pikir yang digunakan untuk membahas objek penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharismi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.”¹

Sejalan dengan hal tersebut, Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J.Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”².

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian skripsi ini adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Maleong bahwa metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan:

¹Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II (Cet.IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 5.

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dengan responden.
3. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan lebih banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti jadikan objek penelitian ini adalah Di sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari yang menjadi pertimbangan sehingga peneliti memilih lokasi tersebut karena:

1. Masalah tersebut belum pernah diteliti, serta kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data.
2. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena sebelum mengajukan judul skripsi peneliti melakukan observasi awal, selanjutnya terdapat masalah dalam hal penerapan sistem desentralisasi pendidikan, sehingga peneliti tertarik untuk memilih lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas-aktivitas tertentu dari objek penelitian yang terjadi di sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari yang lebih berfokus pada Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional.

³*Ibid*, 3.

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari skripsi atau penelitian ini.

D. *Data dan Sumber Data*

Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis terbagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Data primer, yaitu jenis data lewat pengamatan langsung. Wawancara langsung dengan informan dan narasumber. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala Sekolah, Kepala Dinas pendidikan dan staf-staf yang dipilih sebagai informan atau nara sumber.

2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang diperoleh adalah berupa data, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan interpretasi data primer.

E. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai “pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan

data”.⁴ Jadi, observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan pengecapan.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas, peneliti melakukan pengamatan di lapangan menggunakan cara-cara seperti mengamati dan melihat langsung serta mencatat apa yang terlihat di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan kegiatan pencatatan, sehubungan dengan apa-apa yang dilihat dan berkenan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini salah satunya yang diamati langsung adalah penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional.

2. Wawancara

Metode wawancara atau interview adalah alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi dalam buku “metodologi penelitian” mengatakan bahwa: Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.⁵

⁴Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), 266.

⁵Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990), 16.

Wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam, yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dengan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berupa tanggapan, pendapat, prestasi pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, metode ini juga peneliti gunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan desentralisasi sistem pendidikan di dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Palu dalam hal ini, peneliti mengadakan wawancara langsung kepada kepala dinas pendidikan serta staf-staf yang ada, serta sumber-sumber yang dapat mendukung seputar objek penelitian ini, yang kemudian peneliti dilibatkan langsung ke sekolah-sekolah yang telah menerapkan sistem desentralisasi pendidikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data, dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, peneliti juga menggunakan tape recorder sebagai transkrip wawancara dan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabsraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Untuk itulah, diperlukan reduksi data sehingga data tidak bertumpuk dan mempersulit analisis selanjutnya.⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

“Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan: alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data”.⁷ Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

⁶*Ibid* , 287

⁷Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode baru, (Cet.I; Jakarta: UI-Press, 2002), h. 17.

Dengan demikian, pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data disajikan dalam bentuk kata-kata/kalimat sehingga menjadi satu narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut. Dalam konteks ini, “Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman menjelaskan: kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi”.⁸

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi. Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif”, bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tutunan pengetahuan, kriteria, dan paradigmanya sendiri.⁹

⁸*Ibid*, h.19.

⁹J. Moleong, *Metodologi*, 171.

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pembahasan (diskusi), dimana Peneliti mengumpulkan teman-teman yang dianggap mengerti tentang judul skripsi ini melalui data yang Peneliti peroleh dan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri Penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang di rugikan terutama Penulis yang telah mencurahkan segenap tenangnya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

1. SMP Negeri 3 Palu

a. Sejarah berdirinya

Mengenai sejarah berdirinya suatu lembaga pendidikan penulis memaparkan tentang sejarah singkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu, seperti keterangan yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut:

Adapun sejarah singkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu yang terletak di Kecamatan Palu Barat Kelurahan Siranindi, tepatnya terletak di jalan Kemiri No 35 merupakan Sekolah Menengah pertama yang termasuk kategori sekolah unggulan yang ada di kota Palu. Berkaitan dengan hal tersebut sekolah ini berdiri dengan luas bangunan keseluruhan 3.961,50 m² pada tahun 1977 yang telah dipimpin oleh sepuluh orang Kepala Sekolah. Kepemimpinan pertama oleh Andreas Godjang, BA, menjabat dari tahun 1977 sampai 1988 kemudian kepemimpinan di lanjutkan oleh Drs. Djikra Garontina, menjabat dari tahun 1988 sampai 1993 kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Drs. Ramli H. Arsjad, menjabat dari tahun 1993 sampai 1996 kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh M. Rantesigi, BA, menjabat dari tahun 1996 sampai 2000 kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Mohammad Hado. M, S.Pd, menjabat dari tahun 2000 sampai 2004 kemudian kepemimpinan di lanjutkan oleh Darma Burase, S.Pd, menjabat dari tahun 2004 sampai 2005 kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Adnan M. Baralemba, S.Pd menjabat tahun 2005 kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Jusuf Djambolino, menjabat dari tahun 2005 sampai 2013 kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Nurdin I. Umar, S.Pd, M.Pd, menjabat dari tahun 2013 sampai 2018 kemudian kepemimpinan di lanjutkan oleh Wiji Slamet, S.Pd., M.Pd menjabat dari tahun 2018 sekarang.¹

Dengan demikian, sangat dibutuhkan andil dari komponen sekolah dan masyarakat sekitarnya sebagai wujud dari pengembangan sekolah itu sendiri.

¹Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 20 Juli 2018.

Karena apabila masyarakat menjadi komponen sekolah berarti kita harus menjadikannya investasi penunjang dalam rangka mewujudkan sekolah yang maju dan berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara ini, *sekolah Menengah Pertama* berada pada situasi yang sangat menguntungkan atau berada pada jalur yang strategis. Sehingga tidak mengherankan kalau sekolah yang pernah dipimpin oleh sepuluh orang kepala sekolah ini banyak meraih prestasi-prestasi, yang telah mengantarkan sekolah ini menjadi sebuah sekolah yang mampu bersaing baik ditingkat daerah, provinsi maupun nasional.²

b. Letak geografis

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu bertempat di Jl. Kemiri No.35 dan letak lokasinya sangat strategis, karena mudah dijangkau dengan kendaraan umum maupun pribadi yang merupakan prasarana yang cukup membantu terlaksananya proses belajar-mengajar di sekolah.

Letak geografis Sekolah menengah pertama negeri 3 palu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan SD Negeri 4 Palu
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya (Jl. Kemiri)
- c. Sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk dan Jl. Mangga I
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya (Jl. Lombok)

c. Visi dan Misi

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi Smp Negeri 3 Palu

²Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 20 Juli 2018.

“Terwujudnya sekolah berprestasi dan berbudaya lingkungan berdasarkan Imtaq”.

Indikator Visi :

1. Berprestasi
2. Berbudaya Lingkungan (Sekolah Adiwiyata)
3. Berimtaq

Misi SMP Negeri 3 Palu

Berdasarkan Visi maka misi yang diharapkan :

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama.
2. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna.
3. Menumbuhkan semangat warga sekolah dalam berprestasi.
4. Mendorong Warga sekolah mengenali potensi dirinya dan lingkungannya

d. Keadaan Pendidik

Keadaan pendidik dalam proses pembelajaran sangat penting untuk itu pendidik harus memiliki berbagai potensi atau kemampuan sehingga mampu menciptakan suasana kondusif terhadap peserta didik. Pendidik merupakan faktor penentu yang sangat dominan dan pendidikan pada umumnya, karena pendidik memegang peranan dalam proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu, bahwa kepala sekolah beserta pendidik dan rata-rata sudah memiliki ijazah S1, dan pegawai staf administrasi memiliki ijazah D3 dan juga S1 yang terdiri dari 66 pendidik tetap, dengan perincian sebanyak 66 pendidik yang

PNS ditambah 1 kepala sekolah, 9 orang pendidik yang honorer dari jumlah keseluruhan 75 dari pendidik tersebut. 8 orang pendidik yang memiliki ijazah S2. Adapun jumlah tenaga pegawai staf administrasi sebanyak 5 orang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala sekolah berikut:

Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu jika dilihat dari segi kualitas, pendidiknya sudah dikatakan berkualitas karena dalam mendidik peserta didik di sekolah ini telah diatur berdasarkan kompetensi yang sesuai jurusan dan bidang masing-masing, begitupun dari segi kualitas dan jumlah pendidik yang ada di sekolah ini terdapat 78 orang, diantaranya ada 8 orang pendidik yang memiliki ijazah S2 dan ini sangat mendukung proses dalam pembelajaran.³

Berdasarkan hasil wawancara Penulis menyimpulkan jumlah pendidik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu sudah cukup memadai sebagaimana yang dikatakan oleh kepala sekolah tersebut.

e. Keadaan peserta didik

Peserta didik adalah unsur manusiawi yang terpenting dalam interaksi edukatif. Mereka dijadikan sebagai pusat persoalan dalam gerak semua pendidikan dan pembelajaran. Sebagai pokok persoalan, peserta didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan dalam sebuah interaksi. Pendidik tidak memiliki arti apa-apa tanpa kehadiran peserta didik sebagai subyek pembinaan. Jadi, peserta didik adalah penentu dalam poses interaksi edukatif.⁴

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 palu, diperoleh keterangan bahwa, :“jumlah peserta didik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu pada tahun ajaran 2018/2019

³Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 20 Juli 2018

⁴Djamarah, Syaiful Bahri, *Guru dan Anak D idik Dalam Interaksi Edukatif” Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis* (Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2010) ,h. 51

berjumlah 1150 orang yang terdiri dari kelas VII, kelas VIII dan kelas IX”.⁵

Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II
KEADAAN PESERTA DIDIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 3 PALU TAHUN AJARAN 2018/2019

No	Kelas	Peserta Didik		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	VII	172	167	339
2.	VIII	181	230	411
3.	IX	180	220	400
Total		533	617	1150

Sumber Data : Dokumen Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 palu Tahun 2018

f. Kondisi Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang dalam proses pembelajaran yang diharapkan mampu mengantarkan peserta didik menuju ke arah kedewasaan. Keterbatasan sarana pendidikan dan tenaga pengajar di sekolah sudah pasti sangat berpengaruh terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik, permasalahan dalam pembelajaran tidak hanya dihadapi oleh pendidik itu sendiri tetapi juga didukung oleh keberadaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya. Apalagi jika dilihat dalam kenyataan bahwa masih banyak sekolah yang tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif sebagaimana mestinya. Disamping itu juga sarana dan prasarana belajar yang baik akan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar yang maksimal. Adapun sarana dan

⁵Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” (Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 20 Juli 2018)

prasarana yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu dalam kondisi yang baik dan masih layak untuk dipergunakan. Sebagai mana hasil wawancara dengan kepala sekolah.

Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu ini cukup memadai hal ini dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan yang terdiri dari 2 lantai, adanya ruang laboratorium, gedung kantor sekolah serta perpustakaan masih dalam proses penyelesaian renofasi. Dan untuk sekarang ini masuk pembenahan perlengkapan pembelajaran seperti kursi dan meja.⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, untuk lebih jelasnya, mengenai keadaan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL III
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
PERTAMA NEGERI 3 PALU TAHUN AJARAN 2018/2019

Prasarana yang dimiliki

No	Jenis Prasarana	Ketersediaan		Kondisi	
		Ada	Tidak	Baik	Rusak
1	Ruang Kelas	√		√	
2	Ruang Perpustakaan	√		√	
3	Ruang Laboratorium Ipa	√		√	
4	Ruang Pimpinan	√		√	
5	Ruang Guru	√		√	
6	Ruang Tatausaha	√		√	
7	Tempat Beribadah	√		√	
8	Ruang Konseling	√		√	
9	Ruang UKS	√		√	
11	Gudang	√		√	
12	Ruang Sirkulasi	√		√	

⁶Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 20 Juli 2018

Sarana yang di miliki

No	Jenis Sarana	Rasio	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Kursi siswa	35/kelas	√	
2	Meja siswa	35/kelas	√	
3	Kursi guru	1/kelas	√	
4	Meja guru	1/kelas	√	
5	Lemari	1/kelas	√	
6	Papan pajang	1/kelas	√	
7	Papan tulis	1/kelas	√	
8	Tempat sampah	1/kelas	√	
9	Tempat cuci tangan	1/kelas	√	
10	Jam dinding	1/kelas	√	
11	Soket listrik	2/kelas	√	

Sumber Data : Dokumen Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 palu Tahun 2018

Keadaan sarana dan prasarana dapat dikatakan bahwa fasilitas pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu sudah cukup mendukung dalam menciptakan kelancaran proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang baik memadai ditata dengan teratur akan memberikan nuansa yang nyaman dan menyenangkan bagi segenap elemen sekolah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan masing-masing.

2. SD Negeri Inpres Bumi Bahari

a. Sejarah berdirinya

Mengenai sejarah berdirinya SD Negeri Inpres Bumi Bahari penulis memaparkan secara singkat, seperti keterangan yang didapatkan dari observasi dan wawancara dengan kepala sekolah sebagai berikut:

Adapun sejarah singkat sd inpres bumi bahari yang terletak di Kecamatan Palu Barat Kelurahan Lere, tepatnya terletak di jalan Tomampe No 10. Sekolah ini berdiri pada tahun 1978, tanah tempat pembangunan sekolah merupakan tanah hibah yang diberikan oleh tuan tanah di daerah ini, sekolah ini di pimpin oleh 7 kepala sekolah hingga sekarang, kepala sekolah yang pertama bernama: Bali Suro, kedua: Nyonya Ambi Rozali, ketiga: Dra. Bayu Priyati, keempat: Drs. Baharidin Longa, kelima: Drs. Nur Banggo Lemba, keenam: Hj. Ma'rifah Labulong. S.s dan ketujuh: Hj. Rugaiyah, S.Pd menjabat sampai sekarang.⁷

b. Letak geografis

SD Inpres Bumi Bahari terletak di Kecamatan Palu Barat kelurahan lere, tepatnya terletak di jalan tomampe No. 10 luas area 3115 M².

Letak geografis SD Inpres Bumi Bahari yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Tomampe No. 10
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk
- c. Visi dan Misi
- d. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidik didik di SD Negeri Bumi Bahari dapat dilihat di table berikut:

⁷Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruang Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

TABEL IV
KEADAAN PENDIDIK SEKOLAH SD NEGERI INPRES BUMI
BAHARI TAHUN AJARAN 2018/2019

No	Nama Guru/Pegawai	Jabatan	Ket.
1.	Hj. Rugaiyah, S.Pd	Kepala Sekolah	PNS
2.	Putri Nur Baco, S.Pd	Guru Kelas	PNS
3.	Marni, S.Pd	Guru Kelas	PNS
4.	Mahwan, S.Pd	Guru Kelas	PNS
5.	Nengah Sutiasa, S.Pd	Guru Kelas	PNS
6.	Rahmayanti, S.Pd	Guru Kelas	PNS
7.	Arfin, A.Ma.Pd	Guru Penjaskes	PNS
8.	Harianti, S.Pd.I	Guru PAI	PNS
9.	Dra. Sapmawati	Guru Kelas	PNS
10.	Magfirah lationo	Guru Kelas	PNS
11.	Rosin, S.Pd	Guru Penjaskes	Honor
12.	Yud Musdalifah, S.Pd.I	Guru PAI	Honor
13.	Jumrah, S.Pd	Guru Kelas	Honor
14.	Lilis, S.Pd	Guru Kelas	Honor
15.	Latahang Noho, S.Pd.I	Guru PAI	Honor

Sumber Data: Arsip Data SD Negeri Inpres Bumi Bahari

e. Keadaan peserta didik

Adapun keadaan peserta didik di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dapat dilihat di table berikut:

TABEL IV
KEADAAN PESERTA DIDIK

No	Kelas	Jumlah peserta didik tiap kelas
1.	I A	25
	I B	25
2.	II	28
3.	III A	30
	III B	30
4.	IV A	21
	IV B	23
5.	V A	30
	VB	25
6.	VI A	31
	VI B	29
JUMLAH		304

Sumber Data: Arsip Data SD Negeri Inpres Bumi Bahari

Berdasarkan tabel peserta didik di atas, dapat di pahami bahwa jumlah keadaan peserta didik SD Negeri Inpres Bumi Bahari dari kelas I sampai kelas VI berjumlah 304 pada tahun ajaran 2018-2019. Peserta didik SD Negeri Inpres Bumi Bahari sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar Bumi Bahari Kota Palu.

f. Kondisi Sarana Prasarana

Adapun keadaan sarana dan prasarana di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dapat dilihat di table berikut:

TABEL V
KEADAAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH SD
NEGERI INPRES BUMI BAHARI TAHUN AJARAN 2018/2019

No	Jenis sarana dan Prasarana	Ketersediaan		Kondisi	
		Ada	Tidak	Baik	Rusak
1	Ruang Guru	√		√	
2	Ruang Kelas	√		√	
3	Ruang Perpustakaan	√		√	
4	Ruang UKS	√		√	
5	Toilet guru	√		√	
6	Toilet siswa	√		√	
7	Jaringan telepon	√		√	
8	Jaringan internet	√		√	
9	Alat peraga untuk mata pelajaran ipa,ips,mtk dan olah raga	√		√	

Sumber Data: Arsip Data SD Negeri Inpres Bumi Bahari

Berdasarkan data tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sd inpres bumi bahari kota palu belum terlalu memadai, karena di sekolah tersebut belum tersedianya mushollah sebagai penunjang dalam pembinaan peserta didik. Akan tetapi sarana dan prasarana yang lain sudah di anggap dapat menunjang proses pembelajaran.

B. Penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari

1. SMP Negeri 3 Palu

Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam Bab II pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana prasarana serta kepegawaian. Jumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan stakeholders di dalamnya. Sebagaimana penulis memaparkan hasil wawancara dengan kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu yaitu:

Penerapan desentralisasi di sekolah yang dulunya hanya sentralisasi dan sekarang menjadi desentralisasi sangat berpengaruh dalam hal pembangunan mutu pendidikan, seperti halnya di sekolah kami ini saya rasa penerapan desentralisasi sudah cukup baik,sekolah kami sudah menggunakan kurikulum k-13,sarana dan prasarana sudah memenuhi standar nasional pendidikan,yaitu ada mushollah, ada gedung, ada meja ada kuris dan lain sebagainya. Akan tapi belum optimal karena masih ada kendala-kendala yang kami hadapi dalam penerapannya salah satunya yaitu masalah SDM, masalah pembiayaan yang masih sangat kurang, sarana prasarana dan lain sebagainya.tetapi dengan adanya desentralisasi ini kami dari pihak sekolah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sekolah.⁸

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara di atas yaitu: Dengan adanya desentralisasi maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih mampu mengembangkan program-program yang

⁸Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 20 Juli 2018

sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Demikian juga dengan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan, maka rasa memiliki warga sekolah akan meningkat. Adanya peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan rasa tanggung jawab dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, desentralisasi sistem pendidikan nasional meliputi :

1. Organisasi dan poses belajar Mengajar

Proses belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan komunikasi antara guru dan siswa, dengan tujuan agar siswa tumbuh sebagai pribadi yang utuh. Untuk itu dalam sebuah sekolah, aktor yang mempunyai peranan paling penting dalam proses pembelajaran adalah guru. Guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai pengajar. Untuk menjadi seorang guru diperlukan beberapa syarat tertentu dan harus menguasai seluk beluk pendidikan serta menguasai ilmu pengetahuan yang akan diajarkan kepada siswa. hal di atas berdasarkan ungkapan informan :

Di sekolah ini salah satu desentralisasi sistem pendidikan adalah mengenai organisasi dan proses belajar mengajar, seperti waktu belajar mengajar di sekolah, penentuan buku yang digunakan, kurikulum, dan metode pembelajaran.⁹

Hal di atas juga dipertegas oleh pernyataan informan :

Seperti kita ketahui bahwa disekolah ini sudah menggunakan K13, jadi dalam pembelajaran harus efektif. Untuk supaya efektif kita menambah waktu kegiatan dalam proses belajar mengajar. Selain itu Kita juga menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum

⁹Suardi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

dimana siswa yang lebih aktif dalam kelas di bandingkan gurunya. karena dalam kurikulum K13 guru hanya menyajikan materi siswa yang mengembangkan materi tersebut, metode yang kita gunakan kita sesuaikan dengan materi yang akan di ajar. Kalau waktu belajar disekolah itu dari jam 07.20 pagi pulang habis zuhur jam 01.00, karena disekolah ini belum memberlakukan full day school, tetapi ada yang masuk sore untuk sekarang karena bangunan kelas mereka masih di renofasi, sedangkan kalau masalah buku itu sudah diberikan oleh pusat ada buku untuk guru dengan ada buku untuk siswa, kita tinggal membaca, dan mempelajarinya.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam proses belajar mengajar guru dengan siswa harus bekerja sama untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif.

2. Manajemen guru

Manajemen guru tidak saja di mulai pada saat seseorang menjadi guru, namun jauh sebelum dia menjadi guru, yaitu dimulai sejak prajabatan. Proses manajemen seorang guru terdiri dari beberapa tahap yaitu perencanaan, seleksi, proses pelatihan, dan pengembangan, proses evaluasi prestasi dan promosi serta proses pemberhentian dan pensiun. Perencanaan guru sangatlah penting. Hal ini tidak lepas dari berubahnya pandangan kepada sumberdaya manusia. Jika dulu tenaga kerja dilihat sebagai salah satu fakta produksi, namun kini dianggap sebagai rekan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana ungkapan informan:

Selain kepala sekolah Guru guru juga turut berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran, desentralisasi sistem pendidikan mengenai manajemen guru yaitu salah satunya adalah memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru, serta menentukan dan mengadakan pelatihan.

¹⁰Suardi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu "Wawancara" Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

Hal di atas juga di pertegas dengan pernyataan informan:

Pelatihan untuk guru di adakan oleh LPMP dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan, waktu yang di berikan tidak menentu, kadang satu minggu, contohnya kemarin adanya pelatihan mengenai K13 selama satu minggu, yang melakukan pelatihan bukan hanya di kota palu tapi kita bersama-sama dengan orang-orang diluar palu seperti poso,parigi dan lain sebagainya.¹¹

Dari hasil wawancara dengan informan dia atas penulis menyimpulkan bahwa pelatihan untuk guru atau tenaga pendidik memang sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan guru agar dapat membimbing siswanya. apa lagi pelatihan untuk kurikulum K13 itu sangat dibutuhkan, agar semua guru dapat mengaplikasikan kurikulum k13.

3. Struktur dan perencanaan

perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan, Perencanaan juga merupakan suatu proses antisipasi tentang kejadian dan kondisi masa mendatang, dan menentukan upaya terbaik untuk pencapaian tersebut. Perencanaan memang sangat dibutuhkan baik dalam melakukan hal apapun kerana dengan perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Begitu juga dalam hal perencanaan pendidikan,perencanaan sangat berhubungan dengan struktur, dengan adanya struktur akan membantu mensukseskan perencanaan tersebut.

Sebagaimana ungkapan informan:

Perencanaan adalah proses antisipasi tentang kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi, selain organisasi, proses belajar mengajar dan manajemen guru yang di desentralisasikan di sekolah ini juga yaitu: struktur dan perencanaan, seperti dalam hal pengawas atas kinerja sekolah dan defenisi dari isi mata pelajaran.¹²

¹¹Suardi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

¹²Suardi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

Hal di atas juga di pertegas dengan pernyataan informan:

Dalam melakukan pengawasan atas kinerja sekolah biasanya pengawas melakukan pengawasan per semester dua kali, yang diawasi semua komponen yang berhubungan dengan sekolah kami, mulai dari perangkat pembelajaran seperti: kalender pendidikan, analisis alokasi waktu, Rpp, Kkm, Program tahunan, Program semester, silabus, pokoknya itu ada yang namanya buku 1 sampai 4, hasil ulangan siswa, hasil remedial siswa, melihat mana soal yang siswa anggap mudah mana yang di anggap susah. Pengawas juga langsung mengawasi bagaimana guru mengajar di kelas dan lain sebagainya.¹³

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan perencanaan memang sangat dibutuhkan baik dalam melakukan kegiatan apapun tanpa perencanaan yang baik maka hasil yang akan didapatkan tidak baik juga, tetapi kalau adanya perencanaannya baik maka hasilnya akan baik pula.

4. Sumber daya

Sumber daya pendidikan adalah semua faktor yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Sesuai dengan pernyataan informan yaitu:

Kita tau bahwa sumber daya meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasaran, salah satu yang didesentralisasikan yaitu alokasi anggaran untuk guru, tenaga administrasi dan anggaran untuk pelatihan guru.

Hal ini ditegaskan oleh ungkapan informan:

Kalau masalah anggaran untuk guru pemerintah susah memberikan kebijakan bahwa anggaran dana bos yang diberikan pemerintah untuk sekolah 10% untuk guru honorer karena disekolah kami ini masih ada pegawai honorer. Kalau yang bukan honorer tergantung pada

¹³Suardi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu "Wawancara" Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

golongannya, sedangkan untuk anggaran pelatihan guru itu dari pusat yang tentukan guru tinggal ikut pelatihan saja. Tetapi dalam pelatihan guru juga mendapatkan uang transportasi yang diberikan.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan informan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal anggaran untuk guru sudah bisa di bilang cukup walaupun sebenarnya itu belum bisa memenuhi kebutuhan, sedangkan untuk pelatihan saya rasa memang seharusnya begitu setiap guru diberikan uang transportasi apalagi kalau yang jauh tempat tinggalnya sangat membutuhkan transportasi.

2. SD Negeri Inpres Bumi Bahari

Penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasan penuh kepada kepala sekolah dan atas kesepakatan seluruh stafnya untuk memanfaatkan sumber belajar dan semua fasilitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya itu. Kemandirian sekolah terutama kepala sekolah dan stafnya dapat diterapkan dalam bidang kurikulum, ketenagaan, dan dana. Akan tetapi dalam bidang tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi, sebagaimana wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari yaitu sebagai berikut:

Dengan adanya wewenang memberikan keleluasan penuh kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah kalau ditanya penerapannya sudah baik, tapi belum maksimal karena masih banyak kendala-kendala yang kami hadapi yaitu masalah kurikulum yang baru sekarang yaitu K-13, masalah pembiayaan yang masih sangat kurang, masalah SDM dan lain sebagainya, seharusnya dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan juga di butuhkan adanya kolaborasi antara ketiga pelaku utama pendidikan yaitu pemerintah daerah, pihak sekolah dan masyarakat.¹⁵

¹⁴Suardi, Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

¹⁵Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangan Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 20 Juli 2018.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan di terapkannya desentralisasi memberikan keluasan untuk kepala sekola mengelolah sekolahnya sendiri, dalam pelaksanaannya di butuhkan adanya kolaborasi antara ketiga pelaku utama pendidikan yaitu pemerintah daerah, pihak sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, desentralisasi sistem pendidikan nasional meliputi :

1. Organisasi dan poses belajar Mengajar

Efektifitas proses belajar mengajar disekolah dasar merupakan sebuah proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding proses lainnya. Proses belajar mengajar adalah aspek dari lingkungan sekolah yang terorganisasi. Lingkungan ini di atur dan di awasi agar kegiatan belajar terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, sedangkan mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik. Peranan pendidik sangat mempengaruhi dalam proses belajar anak didik. Sebagaimana ungkapan informan:

Salah satu hal yang di desentralisasikan yaitu masalah proses belajar mengajar seperti dalam hal waktu belajar, buku yang di gunakan, kurikulum yang digunakan, dan metode pembelajaran. Dalam pembelajaran guru memang sangat berperan sekali.¹⁶

Hal di atas di tegaskan informan:

Di sekolah kami ini belum mengadakan *full day school* jadi anak-anak masuk jam 07.00.pagi sampai jam 01.00 siang, kita ketahui sekarang

¹⁶Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangan Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 20 Juli 2018.

hampir semua sekolah menggunakan kurikulum K13 begitu juga di sekolah kami, itulah sebabnya dengan di terapkan kurikulum K13 maka dalam pembelajaran siswa yang harus aktif, mangkanya dalam mengajar kami menggunakan metode yang memang membuat anak-anak aktif bukan kita sebagai guru yang berbicara terus,tetapi anak-anak juga ikut aktif dalam pembelajaran, metode yang kita gunakan kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan, apalagi ini masih sekolah dasar kita gunakan metode yang bisa di bilang belajar sambil bermain,, karena anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kalau buku itu di tentukan sama pusat, kami tinggal di kasi.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan informan di atas penulis menyimpulkan bahwa salah satu hal yang didesentralisasikan mengenai proses belajar mengajar yang kewenangannya guru yang sangat berperan sehingga dalam hal proses belajar mengajar semua guru yang siapkan baik mengenai metode dan lain sebagainya, kewenangan yang diberikan saya rasa sudah diterapkan dengan baik oleh sekolah ini.

2. Manajemen guru

Manajemen guru adalah proses pengoordinasikan aktivitas kerja seorang guru mulai dari mulai dari guru itu masuk kedalam organisasi pendidikan sampai akhir berhenti, dalam upaya meningkatkan seluruh potensi peserta didik, baik dalam potensi efektif, kognitif maupun psikomotor.

Seorang guru perlu memiliki standar minimum kompetensi tertentu dalam menjalankan tugas mengajarnya. Standar kompetensi diharapkan dapat melatar belakangi perwujudan kinerja guru, sekaligus sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik peserta didik. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dimiliki. Itulah

¹⁷Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruang Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 20 Juli 2018.

sebabnya harus adanya pelatihan untuk guru. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

Manajemen guru adalah salah satu yang didesentralisasikan dalam pendidikan seperti dalam hal memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru, menentukan dan mengadakan pelatihan, di sekolah kami guru kadang belajar melalui tutor sebaya,, apalagi sekarang sekolah kami menggunakan kurikulum K13, belum ada pelatihan masalah itu guru-guru hanya belajar dari tutor sebaya, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Insyaallah aka ada pelatihan untuk guru mengenai kurikulum K13 yang latih ada dosen untad yang sedang melakukan pengabdian masyarakat.¹⁸

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa guru memang salah satu hal yang harus di manajemen, karena guru sangat berperan dalam proses pembelajaran demi meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Guru memang harus di berikan pelatihan agar lebih memiliki wawasan yang luas.

3. Struktur dan perencanaan

Perencanaan pada intinya merupakan upaya pendefinisian kemana sebuah organisasi akan menuju di masa depan dan bagaimana sampai pada tujuan itu. Dengan kata lain, perencanaan berarti pendefinisian tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan pembuatan keputusan mengenai tugas-tugas dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Sedangkan rencana (plan) adalah hasil dari proses perencanaan yang berupa sebuah cetak biru (blueprint) mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan, jadwal, dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sebagaimana ungkapan informan:

¹⁸Guru SD Negeri Inpres Bumi Bahari “Wawancara”, Ruangan Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 20 Juli 2018.

Perencanaan itu memang sangat dibutuhkan tanpa adanya perencanaan tidak akan tercapai dengan baik tujuan yang di inginkan, dalam hal struktur dan perencanaan hal yang didesentralisasikan salah satunya yaitu mengenai pengawas atas kinerja sekolah, selain kepala sekolah yang mengawasi ada juga pengawas yang mengevaluasi kegiatan pendidikan biasanya setiap semester pasti pengawas datang, dia memeriksa semua hal yang berhubungan dengan sekolah, baik itu bagaimana guru mengajar, perangkat-perangkat pembelajaran seperti rpp, kkm, silabus, kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan lain sebagainya.¹⁹

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan, Perencanaan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang mengarahkan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan. Itulah sebabnya perencanaan sangat penting, terutama perencanaan mengenai kerja yang akan dilakukan, dari perencanaan tersebut harus adanya evaluasi yaitu dengan adanya kepala sekolah mengawasi, selain itu juga ada pengawas yang datang melakukan evaluasi, saya rasa ini sudah bagus karena dalam bekerja seseorang harus memang di evaluasi pekerjaannya. Biar di ketahui ada yang di perbaiki atau tidak.

4. Sumber daya

Sumber daya dalam pendidikan merupakan semua yang dapat di manfaatkan untuk melaksanakan proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Sumber daya pendidikan dapat dikategorisasika menjadi empat kelompok, yaitu : 1. Sumberdaya manusia (SDM), 2. Sumber daya informasi, 3. Sumber daya fisik. 4. Sumber dayakeuangan. Secara umum sumber daya pendidikan terdiri dari : dana, bangunan, peralatan, infrastruktur, ruangan, masyarakat, tenaga, siswa serta waktu.

¹⁹Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangn Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 20 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan informan:

Sumber daya memang cakupannya luas, tetapi salah satu kewenangan yang diberikan yaitu mengenai alokasi anggaran guru dan tenaga administrasi, serta alokasi anggaran untuk pelatihan guru. Kita ketahui bahwa guru adalah salah satu tenaga yang harus di hargai karena pekerjaan guru ini tidak mudah, apalagi dalam hal mengajar. Untuk gaji guru honorer sekarang ada dana bos, nah untuk guru honorer 10% dari dana bos. sedangkan kalau anggaran untuk pelatihan biasanya di adakan oleh LPMP (lembaga penjaminan mutu pendidikan), tetapi biasanya kalau kita ikut pelatihan ada uang transportasinya. Tapi biasanya kalau kita yang adakan pelatihan dana kita ambil dari dana bos, karena dari dana bos, ada dana untuk narasumber yang kita butuhkan dalam pelatihan.²⁰

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa wewenang mengenai anggaran untuk guru dan pelatihannya, memang harus di perhatikan, karena guru merupakan salah satu orang yang sangat berjasa dalam hal meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan memang sangat bahkan harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru itu sendiri.

Dari hasil wawancara pada kedua sekolah yang merupakan sasaran penelitian yakni SD Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu yang tidak termasuk dalam desentralisasi pendidikan adalah kurikulum. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kurikulum di masing-masing satuan pendidikan di tentukan oleh pusat.

C. Problematika penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di SMP Negeri 3 Palu dan SD Inpres Bumi Bahari serta upaya yang dilakukan

1. SMP Negeri 3 Palu

Dalam penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di sekolah ada beberapa masalah yang dihadapi ini sesuai dengan kajian teori pada bab II,

²⁰ Guru SD Negeri Inpres Bumi Bahari “Wawancara”, Ruang Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 20 Juli 2018.

penulis memaparkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 3 Palu yaitu sebagai berikut:

a. Masalah kurikulum

Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian, dan dalam membentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 3 Palu :

Di sekolah ini sudah menggunakan kurikulum K-13, tetapi kendala yang kami hadapi adalah kebanyakan dari guru-guru disini belum mengetahui, itulah yang menjadi kendala utama kami disini tetapi, dari masalah tersebut kami melakukan upaya perbaikan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai kurikulum K-13 tersebut, melakukan workshop, dengan tujuan guru-guru disini bisa mengaplikasikan K-13 dengan baik dan benar. Pada kegiatannya tetap berpegang pada kurikulum nasional, tapi ada kewenangan untuk memutuskan cara apa yang dipakai (misal: penambahan jam pelajaran, perubahan jadwal) dan pemberdayaan mulok sebagai kebutuhan sekolah.²¹

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan kepala sekolah SMP Negeri 3 Palu tersebut sangat baik, karena dengan adanya pelatihan-pelatihan itu akan menambah wawasan guru.

b. Masalah dana/pembiayaan

Pendanaan sekolah menjadi salah satu implikasi penting dari implementasi otonomi desentralisasi pendidikan. Sekolah ditantang untuk mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan kapasitas pendanaannya sendiri. Di sisi lain, sekolah adalah suatu institusi nirlaba, dan berbeda dengan badan usaha lain yang berorientasi keuntungan. Di samping itu, pengalaman menunjukkan bahwa selama

²¹Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018

ini pendanaan merupakan salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh semua sekolah baik swasta maupun negeri. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah:

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti membutuhkan pendanaan agar kegiatan yang dikerjakan berjalan dengan baik, begitu juga halnya dalam pendidikan, kalau mau meningkatkan mutu pendidikan harus di tunjang oleh pendanaan pendidikan, kalau cukup atau tidaknya dana yang diberikan itu belum cukup sama sekali, sehingga saya selaku kepala sekolah dan guru-guru serta komite sekolah bekerja sama agar dana yang diberikan bisa menunjang pembangunan pendidikan itu sendiri, dengan cara pengelolaan sumber pendanaan harus didasarkan pada prinsip selektivitas, efisiensi, keefektifan, dan produktivitas yang tinggi. Sekolah diberi dana utuh berdasarkan kebutuhan dan diberi wewenang mengelola serta mencari tambahan kekurangannya.²²

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara di atas yaitu: dalam pengelolaan dana prinsip tersebut harus di gunakan seperti prinsip Selektivitas berarti kebutuhan investasi yang diperlukan untuk proses pendidikan di sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional, objektif, serta memenuhi asas kebutuhan dan pengembangan.

c. Masalah SDM

SDM khususnya tenaga kependidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penerapan desentralisasi pendidikan. Profesionalisme, kompetensi, dan komitmen. SDM tampaknya masih menjadi agenda permasalahan yang harus dituntaskan ketika sekolah-sekolah sudah memasuki dan melangkah di era desentralisasi pendidikan.

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 3 Palu yaitu sebagai berikut:

²²Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “*Wawancara*” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018

Disekolah ini SDM-nya khusus tenaga pendidikan sudah cukup memadai akan tetapi kekurangannya adalah masih banyak guru-guru yang belum bisa memprogramkan alat elektronik seperti contohnya laptop, computer, itu masalah utamanya bagi guru-guru disini. Tapi kami disini melakukan pelatihan atau belajar dari teman-teman guru yang lain yang bisa. Melakukan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) sekota Palu. Pada aspek ketenagaan ini tidak ada kewenangan untuk merekrut dan memecat tenaga, tetapi dilibatkan dalam menetapkan tenaga dan menilai kinerja.²³

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa tenaga pendidik di sekolah tersebut sudah sangat memadai hanya kendalanya guru belum semua bisa memprogramkan laptop tapi upaya yang dilakukan cukup baik.

d. Masalah sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang untuk penerapan desentralisasi, sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang di pergunakan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sarana pendidikan meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung di gunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana prasarana di sekolah SMP Negeri 3 palu sudah bisa dibilang memenuhi standar untuk sarana dan prasarana sebagai mana hasil wawancara di SMP Negeri 3 Palu yaitu sebagai berikut:

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini memang sudah cukup memadai, walaupun masih ada kekurangan tinggal bagaiman kita mengembangkan dan menjaganya agar tetap bagus, kita bekerja sama dengan semua guru-guru yang ada, dengn siswa dan orang tua siswa.²⁴

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sarana prasarana yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Palu sudah cukup memadai tidak

²³Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

²⁴ Wiji Slamet Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Agustus 2018.

ada masalah yang sangat serius tinggal bagaimana mereka menjaga agar sarana dan prasarana tetap baik, dan sudah memenuhi standar nasional pendidikan.

2. SD Negeri Inpres Bumi Bahari

Hasil observasi dan wawancara penulis di lokasi penelitian mengenai problematika dan upaya penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di sd negeri inprs bumi bahari, ada beberapa problematika yang terjadi yaitu:

a. Masalah kurikulum

kurikulum merupakan keseluruhan program, fasilitas dan kegiatan suatu lembaga pendidikan atau pelatihan untuk mewujudkan visi misi suatu lembaga. Kurikulum merupakan masalah yang pertama yang dihadapi disekolah sd negeri inpres bumi bahari, sebagaimana yang di jelaskan oleh kepala sekolah sd inpres bumi bahari yaitu:

Masalah yang dihadapi disekolah sd inpres bumi bahari yaitu masalah kurikulum, karena sekarang kurikulum yang di gunakan adalah kurikulum k13 jadi, kami guru di sekolah ini masih sulit dalam penilaian untuk lapor siswa karena deskripsi penilaian yang belum kami pahami, dan juga guru-guru disini belum semua mengetahui kurilum k13, belum ada dilakukan pelatiahn hanya mereka belajar melalui tutor sebaya saja.²⁵

sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah sd inpres bumi bahari hal ini sangat mempengaruhi dalam penerapan desentralisasi sistem pendidikan, sehingga perlu adanya upaya yang dilakukan dari kepala sekolah, adapun upaya yang disampaikan kepala sekolah adalah:

Saya melakukan pelatihan untuk para guru-guru tentang pengaplikasin kurikulum K-13, ada dosen dari untad yang melakukan pengabdian

²⁵Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangn Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

masyarakat yang akan mengajarkan guru-guru di sekolah ini mengenai kurikulum K-13.²⁶

Menurut penulis solusi yang di sampaikan kepala sekolah tersebut sangat baik, karena dengan melakukan latihan terus menerus maka akan mudah dan cepat memahami kurikulum k-13 demi meningkatkan mutu pendidikan.

b. Masalah dana/pembiayaan

Masalah dana merupakan masalah yang paling krusal dalam perbaikan pembangunan di Indonesia, anggaran pendidikan masih terlalu rendah. Begitu juga di sekolah sd inpres bumi bahari. Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah sd inpres bumi bahari:

Kalau mau di Tanya cukup atau tidaknya dana untuk biaya pendidikan di sekolah itu sangat belum cukup, dan anggaran yang diberikan masih terlalu rendah.tetapi dengan adanya dana bos yang diberikan pemerintah dapat membantu, anak-anak yang kurang mampu bisa sekolah.²⁷

Dari wawancara diatas Penulis menyimpulkan dengan adanya Kebijakan yang diberika pemerintah yaitu wajib sekolah Sembilan tahun memang sangat membantu anak-anak yang kurang mampu terutama anak-anak yang berada di pelosok. Adapun upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah sd inpres bumi bahari untuk masalah pembiaya yaitu:

Untuk menangani masalah pendanaan bagaimana pintar-pintarnya kita menyusun RKA (rencana kerja dan anggaran) sesuai kebutuhan bukan keinginan.²⁸

c. Masalah SDM

²⁶Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangn Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

²⁷Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangn Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

²⁸Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangn Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

Sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penerapan desentralisasi sistem pendidikan, itulah sebabnya menjadi kendala apabila sumber daya manusianya kurang baik. Begitupun di sekolah sd inpres bumi bahari wawancara bersama kepala sekolah:

Sumber daya manusia di sekolah sd inpres bumi bahari sudah memadai tetapi belum cukup optimal, karena kami masih membutuhkan tenaga pengajar khususnya untuk tenaga pendidik yang sudah PNS, adapun dalam mencari pegawai kami melakukan penyebaran pengumuman penerimaan pegawai melalui media, sesuai dengan syarat-syarat yang telah kami buat.²⁹

Tujuan utama dalam proses rekrutmen adalah mendapatkan tenaga kependidikan (guru) yang tepat bagi suatu jabatan tertentu sehingga orang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di sekolah untuk waktu yang lama. Pelaksanaan rekrutmen merupakan tugas yang sangat penting, krusial dan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang akan digunakan sekolah sangat bergantung pada prosedur rekrutmen dan seleksi yang dilaksanakan disinilah peran kepala sekolah dibutuhkan.

d. Masalah sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang dalam keberhasilan pendidikan di sebuah instansi pendidikan, karena sarana dan prasarana memudahkan semua aktifitas pendidikan yang dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Sama halnya di sd inpres bumi bahari dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi apabila sarana dan prasarana kurang

²⁹Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruang Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

memadai maka bisa menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah sd inpres bumi bahari:

Sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini masih dirasa kurang, sarana dan prasaran yang kurang tersebut adalah tidak adanya ruangan kepala sekolah sendiri, tidak adanya lab computer, lab bahasa dan lab ipa, adanya bangunan yang masih rusak, tidak adanya mushollah.³⁰

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sd inpres bumi bahari kota palu belum terlalu memadai, karena di sekolah tersebut masih banyak bangunan yang belum tersedia seperti lab computer ,lab bahasa dan ruang kepala sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi sarana dan prasarana yang lain sudah di anggap dapat menunjang proses pembelajaran. Sarana dan prasarana disekolah tersebut belum memenuhi standar nasional pendidikan untuk sarana dan prasarananya.

³⁰Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruangan Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 24 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari. Maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya penerapan desentralisasi pendidikan di sekolah, maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri, dengan kemandiriannya, sekolah lebih mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Penerapan desentralisasi pendidikan di SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari sudah cukup baik, seperti dalam hal kurikulum sekolah tersebut sudah menggunakan kurikulum K13, semuanya sudah memenuhi standar nasional pendidikan baik itu dalam sarana prasaranaya, SDM-nya dan pembiayaannya. Tetapi belum bisa dibilang optimal karena msih banyak kendala-kendala yang dihadapi. Adapun desentralisasi sistem nasional yang disekolah meliputi: organisasi dan proses belajar mengajar, manajemen guru, struktur dan perencanaan, dan sumber daya.
2. Adapun kendala dalam penerapan desentralisasi pendidikan di SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari yaitu masalah kurikulum, masalah dana/pembiayaan, masalah SDM, dan masalah sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dalam masalah kurikulum kepala

sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari melakukan pelatihan, workshop tentang kurikulum K13 yang diterapkan. Masalah dana/pembiayaan kepala sekolah melakukan pembelanjaan sesuai dengan kebutuhan, menyusun RKA (rencana kerja dan anggaran) sesuai kebutuhan bukan keinginan. harus didasarkan pada prinsip selektivitas, efisiensi. Masalah SDM upaya yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan untuk guru-guru terutama pelatihan untuk guru-guru yang belum menguasai cara mengoperasikan laptop, computer, melakukan MGMP sekota palu musyawarah guru mata pelajaran). Masalah sarana dan prasarana upaya yang dilakukan yaitu menjaga sarana dan prasarana yang sudah baik, dan yang sudah rusak diganti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran dengan harapan dapat member masukan-masukan yang membangaun dan bermanfaat dalam penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional di antaranya:

1. Kepada kepala sekolah baik itu sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari dapat lebih memperhatikan semua hal yang berhubungan dengan sekolah, seperti guru, harus sering mengadakan pelatihan, untuk meningkatkan wawasan mereka, sarana dan prasarana yang masih kurang, yang rusak di perbaiki segera, pembiayaan dikelola sesuai kebutuhan, dan kurikulum di optimalakan pengaplikasiannya.

2. Kepada guru atau tenaga pendidik di sekolah SMP Negeri 3 Palu dan SD Negeri Inpres Bumi Bahari, lebih di tingkatkan lagi potensi yang dimiliki, lebih kreatif dan inovatif dalam hal memberikan pembelajaran ke siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. Bandung: Universitas Padjajaran. 2000.
- Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II Cet.IX; Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah-Asuh, 1990.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* ,Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- _____*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Edisi Revisi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ihsan Fuad H, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Pt Aneka Cipta Jakarta. 1997.
- Irianto Yoyon Bahtiar , *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2012.
- Jalal Faisal, (ed), *Pendidikan Dalam konteks Otonomi Daerah*, Yokyakarta: Adicipta,2001, 23.
- Karyanti Dwi Tutik, “Pengaruh Kejelasan Sasaran, Desentralisasi, Dan Sistem Pengukuran Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik (Studi Empiris Di Politeknik Negeri Semarang)”,*Tesis*,Semarang: Universitas Diponegoro Semarang,2010.
- Matthew B. Milles, et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, buku sumber tentang Metode-metode baru, Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1992.
- Meriam Noah, dictionary of the English language, secontedition, William Collin publishers, co, 1980.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung :PTRemaja Rosdakarya,2005.

- M.Zein, Yus Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000, PASAL 2, ayat 3, *Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Peraturan Pemerintah RI No.38 Tahun 2007, tentang *Pembagian Urusan Pemerintah*.
- Rugaiyah Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari , “Wawancara”, Ruang Guru Sekolah SD Inpres Bumi Bahari Tanggal 7 Juli 2018.
- Sari Puspita Anna Lely, “Penerapan Asas Desentralisasi Asimetris Dalam Penetapan Kawasan Khusus Sebagai Upaya Pengembangan Potensi Daerah Di Indonesia”, *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.
- Sirozi, M. Politik Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Slamat Wiji Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu “Wawancara” Kantor Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu Tanggal 25 Juli 2018.
- Soedijarto Suparno, Erman, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif” Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis* ,Cet. III, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tilaar, H.A.R., *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga pendidikan* Jakarta: Kencana, 2011.
- Undang-Undang RI. No 2 Tahun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 1999, Pasal 1 Butir (E).
- Undang- Undang R.I, Nomor 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*, pasal 7 ayat 1.
- Yasin M Muhammad, “Implikasi Sistem Pendidikan Nasioanal Terhadap Pendidikan Islam (Studi Atas Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam)”, *Skripsi*, Palu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2010

PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi letak geografis di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu.
2. Observasi luas keseluruhan area di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu.
3. Observasi saran dan prasarana yang ada di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu.
 - a. Gedung.....unit
 - b. Kantor.....unit
 - c. Ruang kelas.....unit
4. Observasi jumlah guru SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu.
5. Observasi jumlah peserta didik SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu.
6. Observasi pegawai SD Negeri Inpres Bumi Bahari dan SMP Negeri 3 Palu.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Kepala Sekolah dan Guru Sd Negeri Inpres Bumi Bahari

1. Bagaimana Sejarah SD Negeri Inpres Bumi Bahari?
2. Bagaimana Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di SD Negeri Inpres Bumi Bahari?
3. Apa saja keputusan yang di desentralisasikan di SD Negeri Inpres Bumi Bahari ?
4. Bagaimana penerapan keputusan yang didesentralisasikan di SD Negeri Inpres Bumi Bahari?
5. Kendala Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di SD Negeri Inpres Bumi Bahari?

B. Wawancara Dengan Kepala Sekolah dan Guru Smp Negeri 3 Palu

1. Bagaimana Sejarah SMP Negeri 3 Palu?
2. Bagaimana Keadaan Pendidik Bagaimana Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di SMP Negeri 3 Palu?
3. Apa saja keputusan yang di desentralisasikan di SMP Negeri 3 Palu?
4. Bagaimana penerapan keputusan yang didesentralisasikan di SMP Negeri 3 Palu ?
5. Kendala Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Dalam Penerapan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional di SMP Negeri 3 Palu?

**KEADAAN PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
3 PALUTAHUN AJARAN 2018/2019**

No	Nama Guru/Pegawai	Jabatan	Ket.
1.	Wiji Slamet, S.Pd.,M.Pd	Kepala Sekolah	PNS
2.	Darius T.Patampang, S.Pd,M.Pd	Wakasek Bidang Kurikulum	PNS
3.	Andi Hakim Ramang, S.Pd	Wakasek Bidang Kesiswaan	PNS
4.	Dra. HJ. Hanifa	Wakasek Bidang Humas	PNS
5.	Rosydah, S.Pd	Wakasek Bidang. Sarana dan Prasarana	PNS
6.	Zulfan	Koordinator TU	
7.	Dra. Husnia S. Abd. Kadir	Guru	PNS
8.	DRS. Moh. Iqbal	Guru	PNS
9.	Zuhaeriah, S.Ag, M.Pd.I	Guru	PNS
10.	Hj. Fatimah Intan, S.Pd	Guru	PNS
11.	Riana Kalingani, S.Pd	Guru	PNS
12.	Hj. Siti Ramlia, A.Md.Pd	Guru	PNS
13.	Purwanti S.Pd	Guru	PNS
14.	Zuhrah Dachrud, S.Pd	Guru	PNS
15.	Drs. Zainal Yasin	Guru	PNS
16.	Haskin, S.Pd	Guru	PNS
17.	Sartin A. Akuba, S.Pd	Guru	PNS
18.	Rosmini, S.Pd	Guru	PNS
19.	Damaris Wengkau, S.Pd	Guru	PNS
20.	Dra. Nuryani Malawi	Guru	PNS

21.	Hj. Nursinah, S.Pd	Guru	PNS
22.	Salmawaty, S.Pd	Guru	PNS
23.	Nurhayati, B. S.Pd	Guru	PNS
24.	Hj. Nurmin, S.Pd	Guru	PNS
25.	Sri Astuti Ningsih, S.Pd	Guru	PNS
26.	Maryam, S.Pd	Guru	PNS
27.	Rukiyah, S.Pd	Guru	PNS
28.	Niluh Wardhani, S.Pd	Guru	PNS
29.	Rospiah B.DG. Parani, S.Pd	Guru	PNS
30.	Hj. Hindon, S.Pd	Guru	PNS
31.	Hj. Beniar, S.Pd	Guru	PNS
32.	Rosmin Tangkilisan, S.Pd	Guru	PNS
33.	Halimah, A.Md. Pd	Guru	PNS
34.	Sri Marthati B. S.Pd, M.Pd	Guru	PNS
35.	Hj. Wapsi Taliki, S.Pd, M.Pd	Guru	PNS
36.	Dra. Hj. Yuliansi Y. Zainal	Guru	PNS
37.	Dra. Hj. Sumarni R	Guru	PNS
38.	Natalia Ta'dung, S.Pd	Guru	PNS
39.	Moh. Yamin, S.Pd	Guru	PNS
40.	Ossamaliki Utarakal, S.Pd	Guru	PNS
41.	Hj. Misnawaty, S.Pd	Guru	PNS
42.	Hj. Sukmawati, S.Pd	Guru	PNS

43.	Hj. Almiyati, S.Pd	Guru	PNS
44.	Hj. Hidayati, S.Pd	Guru	PNS
45.	Dra. Hj Darmiati	Guru	PNS
46.	Dian Nurul Yuliandari, SE	Guru	PNS
47.	RUDY M. Salim, SE	Guru	PNS
48.	Mariyani W. Powero, S.Pd	Guru	PNS
49.	Hadijah, S.Pd	Guru	PNS
50.	Zubaidah, S.Pd, M.Pd	Guru	PNS
51.	Muzna Rumu, S.Pd	Guru	PNS
52.	Andi Zahraeni, S.Pd	Guru	PNS
53.	Khaerul, S.Md. Pd	Guru	PNS
54.	Rismawati, S.Pd	Guru	PNS
55.	Finisca Roya, M.Pd	Guru	PNS
56.	Maryam Al-Mahdaly, S.Pd	Guru	PNS
57.	Zulpandli Lumban Gaol, S.Pd	Guru	PNS
58.	Hi. Suardi HB. S.Ag	Guru	PNS
59.	Hj. Sitti Fatimah H, S.Pd	Guru	PNS
60.	Hetti Salindeho, S.Pd	Guru	PNS
61.	Hj. Sitti Rosniati, S.Pd	Guru	PNS
62.	Nuryana Jalisando, SE	Guru	PNS
63.	Rachmatullah, S.Pd	Guru	PNS
64.	Desak Putu Sastrawati, S.Pd	Guru	PNS

65.	Balling, S.Pd	Guru	PNS
66.	Dra. Reme, M.Pd	Guru	PNS
67.	Sandi Asih Munder, S.Pd	Guru	Honorar
68.	Suhendra Maudara, S.Pd	Guru	Honorar
69.	Imran, S.Pd	Guru	Honorar
70.	Indri Presia Widuri, S.Pd	Guru	Honorar
71.	Sovia Lidiawati, S.Pd	Guru	Honorar
72.	Fuad Susanto, S.Pd	Guru	Honorar
73.	Namira, S.Pd	Guru	Honorar
74.	Nur Aina Manuli, S.Pd	Guru	Honorar
75.	Rosnawati, S,Ag	Guru	Honorar

**Sumber Data : Dokumen Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Palu
Tahun 2018**



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI INPRES BUMI BAHARI



Alamat : Jl. Tomampe No. 10 Telp. 0451-460493

Kelurahan : LERE
Kecamatan : Palu Barat
Kota : Palu

Propinsi : SULAWESI TENGAH
Telp : 0451-460493
Kode Pos : 94221

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO. 001.2/98/SD Imp/BB/pend.

Tang bertanda tangan dibawah ini kepala SD Negeri Inpres Bumi Bahari, menerangkan bahawa:

Nama : WARDAYANA

NIM : 14.1.03.0059

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Mar mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian/observasi pada tanggal
Juli s.d 15 Agustus 2018 di SD Negeri Inpres Bumi Bahari dalam rangka penyelesaian Skripsi
gan judul:

**“STUDI TENTANG PENERAPAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL DI DINAS DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU
(SD NEGERI INPRES BUMI BAHARI DAN SMP NEGERI 3 PALU)”.**

ai surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang menindaklanjuti surat dari
n Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, pada
al 16 juli 2018, Nomor: 671/In.13/F.I//PP.00.9/07/2018.

kian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 4 September 2018

Kepala Sekolah



Hj. Ruzayyah, S.Pd.

Nip. 19680822 199312 2 001



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 PALU
NSS : 201186001003



Alamat : Jl. Kemiri No. 35 Telp. 421992

Kelurahan : SIRANINDI
Kecamatan : Palu Barat
Kota : Palu

Propinsi : SULAWESI TENGAH
Telp. : (0451) 421992
Kode Pos: 94223

SURAT KETERANGAN

NO. KP.7/562/421.3/ Pend

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP Negeri 3 Palu, menerangkan bahwa :

Nama : WARDAYANA
NIM : 14.1.03.0059
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Benar Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan Penelitian/Observasi pada tanggal 10 Juli s.d 30 Agustus 2018 di SMP Negeri 3 Palu dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

“ STUDI TENTANG PENERAPAN DESENTRALISASI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU
(SD INPRES BUMI BAHARI DAN SMP NEGERI 3 PALU) “.

Besuai surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, tanggal 16 Juli 2018, Nomor : 671/In.13/F.I/PP.00.9/07/2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



AMAT, S.Pd., M.Pd
NIP. 19640407 198901 1 007



Gambar 1:Papan Nama SD Negeri Inpres Bumi Bahari



Gambar 2: ruang guru SD Negeri Inpres Bumi Bahari



Gambar 3: Proses belajar mengajar siswa-siswi SD Negeri Inpres Bumi Bahari



Gambar 4: Wawancara dengan Kepala sekolah SD Negeri Inpres Bumi Bahari



Gambar 7. Kantor SMA Negeri 3 Palu



Gambar 8. Mesjid SMA Negeri 3 Palu



Gambar 9: Wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Palu



Gambar 10. Wawancara dengan guru SMP Negeri 3 Palu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI



Nama : Wardayana
Tempat Tanggal Lahir : Pandajaya, 11 Januari 1996
Agama : Islam
Fakultas : Tarbiyah dan ilmu keguruan
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Nim : 14. 1. 03. 0059
Alamat : Jl. Samudra II

B. Orang Tua :

1. Ayah

- a. Naama : Kamarudin
- b. Pekerjaan : Tani
- c. Pendidikan : Sekolah Dasar
- d. Alamat : Poso

2. Ibu

- a. Nama : Manisah
- b. Pekerjaan :URT
- c. Pendidikan :Sekolah Dasar
- d. Alamat : Poso

C. Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 4 Inpres Mayoah Tahun 2003-2008
2. MTS Negeri 3 Poso Kab. Poso Kec. Pamona Selatan Tahun 2009-2011
3. MAN 2 Poso Kab. Poso Kec. Pamona Selatan Tahun 2011-2014
4. SI pada jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) IAIN Palu Tahun 2014-2018